

Bro 4755
11

SEDJARAH GERAKAN BURUH INDONESIA

oleh : D.N. AIDIT

JAJASAN „PEMBARUAN”

UIT DE NALATENSCHAP VAN
Annie Averink & Eep van Ommeren

SEDJARAH GERAKAN BURUH INDONESIA

(DARI TAHUN 1905 SAMPAI TAHUN 1926)

OLEH

D. N. AIDIT

I

JAJASAN "PEMBARUAN"
DJAKARTA

10953364

INT: INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS
AMSTERDAM



D. N. AIDIT

ISI

	HAL.
KATA PENGANTAR	7
PENDAHULUAN	9
BAB I IMPERIALISME DI INDONESIA	13
BAB II TIGA PERTENTANGAN POKOK DALAM TUBUH IMPERIALISME	27
BAB III GERAKAN BURUH INDONESIA SAMPAI PEMBERONTAKAN TA- HUN 1926	36

KATA PENGANTAR

Satu kekurangan besar yang sangat dirasakan oleh kader² gerakan buruh pada waktu belakangan ini ialah belum diketahuinja sedjarah gerakan buruh Indonesia. Dengan perkembangan gerakan buruh sekarang ini, dimana tingkatan kesadaran berorganisasi dari kaum buruh sudah semakin tinggi, sehingga melahirkan serikatburuh² pada hampir setiap tjabang produksi, maka mulai dirasakan sungguh² pentingnja pengetahuan sedjarah gerakan buruh Indonesia oleh kader² yang memimpin gerakan buruh sekarang ini. Memang adalah suatu kenjataan, bahwa kurangnja pengertian dari kader² buruh tentang sedjarah gerakan buruh Indonesia, selama ini telah mendjadi penghambat yang besar bagi perkembangan yang tjepat daripada gerakan buruh sendiri. Kenjataan ini sangat mudah untuk difahamkan djika diingat bahwa kader² yang memimpin gerakan buruh sekarang ini hampir seluruhnja masih sangat muda usianja. Dari kader² yang masih muda usianja, tentu sadja tidak bisa diharapkan bahwa mereka bisa mempunjai pengalaman yang kaya dilapangan organisasi maupun dilapangan politik. Tetapi kekurangannya yang disebabkan oleh usia yang muda ini bukannya tidak bisa diatasi. Dan djalan satu-satunja untuk me-

~~tidak~~
tidak ada
tidak ada
tidak ada

Satoh Satoh

ngatasi jalah mengisi kekurangan pengalaman itu dgn. pengetahuan dari buku, pengetahuan dari sedjarah. Tetapi djustru buku tentang sedjarah gerakan buruh Indonesia jang diperlukan ini belum tersedia selama ini.

Berdasarkan kenjataan^a diatas ini, kita berkejakinan bahwa terbitnja brosur sedjarah Gerakan Buruh Indonesia sekarang ini akan mendapat sambutan jang hangat dari kader² buruh pada umumnja.

Penerbit

Djakarta, Desember 1952.

PENDAHULUAN

Masaalah pokok dari masjarakat kapitalis. Masjarakat barangdagangan. Hukum² ekonomi jang menguasai perkembangan kapitalisme. Zaman imperialisme dan pengaruhnja atas gerakan buruh. Menjusun organisasi buruh atas dasar nasional dan mengadakan kerdjasama setjara internasional.

Masaalah pokok dari masjarakat kapitalis dapat kita simpulkan dalam pertanjaan : Apa sebab disatu fihak ada manusia jang bekerdja keras, tetapi walaupun demikian tidak mendapat hasil jang tjukup untuk hidup sebagai manusia, sedangkan difihak lain ada manusia jang hidup sangat mewah dengan bekerdja sedikit atau samasekali tidak mesti bekerdja untuk mendapatkan kemewahan itu. Atau kita simpulkan dengan perkataan lain : Bagaimana bisa terdjadi, bahwa segolongan ketjil manusia menguasai hasil pekerdjaan orang banyak ?

Untuk mendjawab pertanjaan ini kita harus mengenal sifat dari kapitalisme. Per-tama² harus kita ketahui, bahwa kapitalisme jalah masjarakat barangdagangan. Apakah artinja masjarakat barangdagangan ?

Masjarakat barang dagangan artinja, bahwa barang² jang diproduksi, tidak ditudjukan langsung untuk dipakai, tidak untuk memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi ditudjukan untuk didjual dipasar agar mendapat untung. Djadi tudjuan pertama, bukan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi untuk mendapat keuntungan. Djadi bagi kapitalisme, jang penting dihasilkan bukannya barang jang paling dibutuhkan oleh Rakjat, tetapi barang jang

paling banyak mendatangkan untung baginya. Kelanjutan daripada tudjuan mentjari untung ini ialah adanya produksi setjara anarki dan adanya persaingan merdeka.

Perkembangan daripada kapitalisme tunduk pada hukum yang tertentu. Adalah kebesaran daripada Karl Marx (1818-1883) yang telah dapat membukakan hukum^a ekonomi dalam bukunya yang terkenal, jaitu "**Kapital**". Ditemukannya teori nilai lebih oleh Marx segera menjinari masaalah yang bagi penjelidik^a sebelum Marx merupakan masaalah yang gelap, gelap bagi ahli ekonomi burdjuis maupun bagi kritikus^a sosialis. Karl Marx dan **Frederick Engels** (1820-1895) telah menemukan "hukum gerak" daripada kapitalisme, dan dalam banyak buku^anya telah membeberkan bentuk dan akibat daripada sistim kapitalis. Dalam peladjaran ekonominya, jaitu ekonomi politiknya, Marx tidak hanya mengadjar proletariat tentang bagaimana kedudukannya dalam masjarakat kapitalis, tetapi juga memberikan djaminan^a pada proletariat akan kemenangannya sendiri.

Dalam pertengahan abad ke-19, di-negeri^a yang sudah maju, perusahaan-perusahaan kepunjaan sesuatu famili bergabung menjadi satu dan dengan demikian membuka djalan bagi industri tjara besar-besaran. Kapital untuk industri mulai berpadu dengan kapital bank, yang melahirkan kapital finans. Djadi, kapital finans ialah perpaduan antara kapital bank dengan kapital industri. Di Amerika Serikat kapitalis besar seperti **J.P. Morgans** mulai menanamkan modalnya yang besar kedalam industri, memadjukan dan menguasai industri, misalnya **United States Steel Corporation**. Di Djerman "bank dagang" seperti Darmstadter, Deutsche dan Dresdener melakukan pekerdjaan terutama dalam memadjukan, memberi modal dan mengawasi perusahaan industri.

Peluasan ekonomi Djerman maju dengan sangat

pesat. Sedjak tahun 1873, kaum kapitalis Inggris untuk pertama kalinya mulai mendapat "saingan luarnegeri" yang sungguh hebat. Perlombaan mentjari pasar, mentjari sumber bahan mentah dan mentjari djalan yang menguntungkan untuk mengexport kapital, menimbulkan perebutan tanah djadjahan. Pembagian dunia diantara negara^a pendjadjah ini selesai pada akhir abad ke-19.

Kapitalisme yang sudah mentjapai perkembangannya sebagai yang diterangkan diatas, dinamakan imperialisme. Djadi, imperialisme adalah tidak lain daripada kapitalisme yang sudah mentjapai tingkat yang paling tinggi, tingkat yang sudah mendekatkan kapitalisme kepada liang kuburnya, jaitu dimana kapital bank dan kapital industri sudah berpadu menjadi satu, menjadi kapital finans. Tingkat imperialisme ditjapai oleh kapitalisme pada peralihan dari abad kesembilan-belas keabad kedua puluh. Pada tingkat ini seluruh dunia sudah dikuasai oleh kapital dan semua daerah koloni sudah di-bagi^a diantara negara^a imperialis. Dengan demikian sistim produksi kapitalis menjadi satu sistim dunia.

Dalam zaman imperialis rumahtangga dunia dikuasai oleh satu sistim ekonomi. Didalam rumahtangga dunia yang satu ini terdapat berbagai grup negara yang satu dengan lainnya bertentangan, yang antara lain dengan djalan peperangan berebutan daerah, berebutan sumber bahan mentah dan pasar.

Zaman imperialis besar pengaruhnya pada kemajuan gerakan buruh. Pertama^a, kemajuan industri setjara besar^aan melahirkan massa kaum buruh yang lebih besar lagi dan menggampangkan menjusun organisasi buruh diatas dasar klas yang lebih luas.

Pada mulanya, kaum buruh hanya bersangkutan dgn. kaum madjukan setempat^a. Ini pula yang menyebabkan gerakan buruh di Inggris terhambat kemajuannya oleh perasaan kedaerahan dan perasaan golongan

(ingat Owenisme dan Chartisme pada pertengahan jang pertama dari abad ke-19).

Sekarang kaum buruh mesti menghadapi persekutuan² perusahaan besar jang meliputi seluruh nasion, djadi tidak lagi menghadapi orang-seorang. Dengan sendirinja, organisasi jang bisa dengan tepat melindungi kepentingan kaum buruh, hanja organisasi serikatburuh jang disusun diatas dasar nasional (meliputi seluruh nasion), dan bersamaan dengan itu mengulurkan tangannja hingga keluar batas daerah² nasional djuga. Jang terachir ini adalah penting, mengingat bahwa dalam zaman imperialis rumahtangga dunia dikuasai oleh satu sistim ekonomi.

Hanja dalam hubungan seperti diterangkan diatas kita bisa memahami masjarakat Indonesia dan hubungannja dengan dunia luar. Dan hanja dalam hubungan itu pula kita bisa memahami gerakan buruh dan gerakan Rakjat Indonesia, serta hubungan gerakan nasional ini dengan gerakan buruh dan gerakan Rakjat sedunia.

BAB I IMPERIALISME DI INDONESIA

Penghapusan perbudakan "cultuurstelsel" dan monopoli-negara. Zaman kapitalis industri di Indonesia. Permulaan zaman imperialis di Indonesia dan timbulnja proletar industri. Kedudukan Indonesia dalam ekonomi dunia. Walaupun sudah ada industri modern, tetapi Indonesia adalah negeri agraria atau negeri burdjuis ketjil.

Sebelum tahun 1870, exploitasi (penghisapan) jang didjalankan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap Rakjat Indonesia didasarkan atas peraturan "cultuurstelsel". Peraturan ini dilahirkan dalam tahun 1830 dibawah kekuasaan gubernur djenderal van den Bosch (gubernur djenderal di Indonesia tahun 1830-1833, kemudian tahun 1833-1839 mendjadi menteri djadja-han). "Cultuurstelsel" diadakan dengan maksud supaja Indonesia bisa membikin sehat keuangan negara Belanda jang sedang bangkrut disebabkan oleh pengeluaran untuk melawan Dipo Negoro (perang Dipo Negoro tahun 1825-1830, dan untuk ini negara Belanda harus mengeluarkan f.20.000.000,—), untuk menindas perlawanan bangsa Belgia terhadap Belanda (pembrontakan Belgia 1830-1839), dan disebabkan oleh keadaan ekonomi negeri Belanda jang pada umumnja sangat djelek ketika itu. Apa sebab djustru van den Bosch jang dikirim ke Indonesia oleh radja Belanda Willem I? Karena van den Bosch mempunjai pengalaman sebagai gubernur Guyana-Belanda dibagian Utara dari Amerika Selatan, dimana dilakukan kerdja perbudakan sebagai dasar penghisapan kolonial.

"Cultuurstelsel" mewadjabkan kaum tani : 1) menje-

rahkan sebagian hasil buminja kepada pemerintah Hindia Belanda; 2) kerdja-paksa (rodi) untuk pemerintah; 3) memikul berbagai matjam pajak.

Kemudian kewajiban "menjerahkan sebagian hasil buminja" dan "kerdja-paksa", diganti dengan "menjerahkan sebagian tanahnja" untuk ditanami bahan² export yang laku pada waktu itu (kopi, teh, tom atau indigo). Rakjat diwadjibkan mengerdjakan tanah bagian pemerintah mulai dari membuka tanah, menanam, memelihara, mendjaga, memetik, memelihara hasilnja, mengangkut kegudang, mendjaga gudangnja, hingga bahan² itu terdjual. Pekerdjaan ini semua dikerdjakan dengan paksaan. Dengan "cultuurstelsel" ini pemerintah Hindia Belanda memegang monopoli atas hasil export Indonesia dengan tiada kongkurensi dari siapapun. Dengan demikian djelaslah, bahwa "Cultuurstelsel" ditambah dengan kekuasaan radja² diberbagai daerah, merupakan penghisapan dan penindasan yang sangat kedjam atas kaum tani Indonesia oleh kapital dagang asing (Belanda) dan oleh radja², yang dilakukan dengan se-wenang², setjara memusat maupun setjara lokal.

Oleh pemerintah Hindia Belanda ditetapkan, bahwa yang menampung hasil bumi ialah **Nederlandse Handel Maatschappij**, jaitu maskapai yang didirikan oleh radja Willem I. Disamping menjerahkan sebagian hasil buminja kepada pemerintah Hindia Belanda, kaum tani masih diharuskan menjerahkan sebagian dari hasil buminja kepada kaum bangsawan bumiputera dan harus mengerdjakan pekerdjaan untuk kaum bangsawan dengan tidak dibayar. Dengan demikian, dibawah "cultuurstelsel" yang masih tinggal bagi kaum tani hanya kemelaratan belaka. Oleh karena itu kaum tani mengadakan perlawanan² yang sengit terhadap "cultuurstelsel" dengan mengadakan pemberontakan² setempat atau dengan mengadakan perlawanan setjara diam² terhadap pelaksanaan kerdja-paksa.

Kebalikan daripada kemelaratan bagi kaum tani, dengan adanya "cultuurstelsel" negara Belanda dapat mengangkut keuntungan beratus-ratus djuta florin (rupiah Belanda). Tentang kekedjamaan "cultuurstelsel" ini telah diadakan kritik yang sangat tajam oleh **Multatuli** (nama samaran Eduard Douwes Dekker, hidup tahun 1820-1887), jaitu seorang Belanda yang dalam tahun 1856 mendjadi Asisten Residen di Lebak, Banten, dalam bukunya yang tersohor "**Max Havelaar**". Multatuli adalah masuk golongan penulis revolusioner, walaupun dia tidak mengetahui djalan keluar daripada keadaan yang tidak baik yang dikutuknja.

Sangat menarik hati, bahwa **Frederick Engels** dalam suratnja kepada **August Bebel** (sosialis Djerman, 1840-1913) pada tanggal 18 Djanuari 1884 menerangkan, bahwa keadaan di Djawa dibawah "cultuurstelsel", dengan exploitasi-negara yang tak terbatas, adalah tjontoh yang sangat baik bagi kaum "sosialis" yang pada waktu itu memandang "sosialisme-negara" sebagai djuruselamat. Djawa dengan "cultuurstelsel"-nja adalah model bagi sosialisme-negara yang di-tjita²kan oleh kaum "sosialis". Dibanding dengan praktek "cultuurstelsel" Belanda di Djawa, apa yang dilakukan oleh **Bismarck** (pemimpin reaksioner dari negara Djerman tahun 1815-1898) hanjalah perbuatan kanak². Engels mengatakan, sebagai edjekan kepada kaum "sosialis", bahwa di Djawa "**pemerintah Belanda dengan sangat bagus setjara sosialis telah mengorganisasi seluruh produksi atas dasar masyarakat desa yang masih komunis kuno dan pendjualan daripada hasil produksi berada dalam tangan negara**". Dan kita ketahui bahwa dari sosialisme-negara inilah dikeduk keuntungan beratus-ratus djuta. Demikianlah kekuasaan negara kapitalis atas produksi dan distribusi samasekali tidak berarti sosialisme.

Sifat monopoli dari pemerintah Belanda seperti diterangkan diatas, mendjadi penghalang yang sangat

besar bagi perkembangan modal partikular dari kaum burdjuis Belanda yang sedang tumbuh. Sesuai dengan perkembangan kapital industri partikular dinegeri Belanda, pada akhir abad ke-19 timbullah dorongan yang sangat besar dari kalangan burdjuis Belanda untuk melebarkan sajanja ketanah djadjahan, artinja untuk mengexport modalnja ke Indonesia. Ini menimbulkan perdjuaan politik yang sengit dinegeri Belanda. Di satu pihak golongan pemerintah, jaitu golongan yang mempertahankan "cultuurstelsel" dan monopoli-negara, sedangkan difihak lain golongan kaum liberal, jaitu kapitalis industri partikular Belanda yang membela sistim "baru" dan mengandjurkan "kerdja merdeka" di Indonesia, sebagai kebalikan daripada sistim monopoli-negara dan kerdja-paksa.

Sekalipun pihak pemerintah keras mempertahankan sistim monopoli-negara dan kerdja-paksa, tetapi akhirnya kaum kapitalis industri partikular dan "kerdja merdeka" mendapat kemenangan. Pada 1 Djanuari 1860 dalam prinsipnja perbudakan di Djawa dihapuskan. Dalam tahun 1860 hari kerdja untuk negara, apa yang disebut rodi (herendienst), setjara resmi masih berdjumlah "52 hari dari 10 djam" saban tahun, dan dalam djumlah ini belum dihitung kewadjaban-kerdja untuk kaum feodal, untuk pegawai negeri dan untuk desa. Penghapusan sepenuhnya daripada tanam-paksa untuk perusahaan gula baru dilakukan tahun 1890.

Dalam tahun 1870 diadakan undang² agraria, jaitu undang² yang mendjamin didaptnja tanah untuk kepentingan kapital partikular. Ini adalah pembukaan pintu yang difinitif bagi kapital industri partikular untuk ambil bagian dalam penghisapan kolonial. Dengan demikian, tahun 1870 adalah permulaan perpindahan dari politik kapital dagang monopoli kepolitik kolonial "baru" daripada kapital industri, perpindahan dari sistim monopoli kesistim persaingan merdeka. Dalam tahun 1870 itu djuga diadakan undang² gula, jaitu undang² yang mem-

beri kebebasan pada kapital partikular untuk mengusahaan gula.

Dengan dibukanya Terusan Sues tahun 1869, hubungan antara Nederland dengan Indonesia dipermudah. Ini membukakan kemungkinan lebih besar lagi bagi perkembangan kapital partikular. Tahun 1870 didirikan maskapai pelajaran Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) yang mengatur hubungan Amsterdam-Indonesia. Tahun 1870 didirikan hubungan kereta-api yang pertama antara Semarang-Surakarta. Tahun 1883 didirikan N.V. Rotterdamse Lloyd (RL) sebagai hasil perkawinan antara kapital Inggris dengan Belanda (NHM) dan kapalnja berlajar dibawah bendera Belanda. Untuk perhubungan interinsuler oleh SMN dan RL dibentuk N.V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM), djadi djuga sebagai hasil perkawinan antara kapital Belanda dengan kapital Inggris. Untuk menjaingi SMN dan KPM, maskapai pelajaran di Liverpool (Inggris) Alfred Holt & Co dalam tahun 1891 mendirikan De Nederlandse Stoomvaart Maatschappij "Ocean".

Karena kapital bank memegang rol yang sangat penting dalam peralihan dari zaman kapital dagang monopoli zaman imperialis (zaman peralihan itu di Indonesia jalah dari tahun 1870 sampai 1895), maka penting diketahui rol bank² kolonial di Indonesia.

Jang sangat penting jalah rol dari Javasche Bank sebagai bank setengah-resmi dengan hak² istimewa. Bank ini didirikan tahun 1828, djadi tepat ketika menghadapi zaman "cultuurstelsel" dan monopoli negara. Kepada Javasche Bank diberi hak untuk mengeluarkan uang kertas. Kapital partikular kurang perhatiannja pada Javasche Bank, karena dibawah kekuasaan monopoli-negara, fungsi daripada bank adalah sangat terbatas dan sifatnja jang setengah-resmi tidak sesuai dengan perkembangan masjarakat kapitalis jang modern. Baru tahun 1889 fungsi Javasche Bank diperluas,

artinja dibolehkan membeli dan mendjual wissel luar negeri, boleh memberikan credit dan boleh memasukkan kapitalnja kedalam perdagangan effect dan hipotik. Sebelum tahun 1889, Javasche Bank mempunyai sifat bank-emissie jang setengah feodal. Dan sifat ini kemudain djuga masih terus dipertahankan, jang antara lain kelihatan dari kenyataan bahwa presiden Javasche Bank harus diangkat oleh gubernur djenderal dengan persetujuan radja Belanda.

Hampir bersamaan waktunya dengan didirikannya Javasche Bank, dalam tahun 1824 didirikan **Nederlandse Handel Maatschappij (NHM)** atau **FACTORIJ**, jang dalam perkembangan selanjutnya mendjadi salah satu bank kolonial jang terpenting di Indonesia. Pada mulanja maskapai ini adalah satu perusahaan dagang dan perkapalan jang erat hubungannya dengan pemerintah Belanda dan dengan kaum istana Belanda. Teranglah, bahwa maskapai ini mendapat hak² monopoli dan seluruh hasil bumi jang didapat negara dari "cultuurstelsel" djatuh kedalam tangan maskapai ini. Dan karena hasil² bumi ini sangat penting bagi industri dinegeri Belanda dan di Indonesia (fabrik teh, gula, dsb.), maka jelaslah bahwa NHM mempunyai pengaruh jang besar atas industri² itu.

Bertambah besarnya pengaruh kapital partikular di Indonesia kelihatan pada bagian kedua dari abad ke-19 dengan didirikannya sedjumlah bank² kolonial, antara lain: Tahun 1857 didirikan **Nederlands-Indische Escompto Maatschappij**, jaitu bank jang tertua jang didirikan dalam periode perkembangan kapital industri partikular. Pekerdjaan bank ini jalah menggerakkan kapital jang ada di Indonesia. Kewadjabannya jalah membikin operasi² dilapangan credit dan wissel. Dalam tahun 1863 didirikan **Nederlands-Indische Handelsbank (NIHB)**, jang sedjak tahun 1950 bernama **Nationale Bank**, dimana didalamnja, ketjual kapital Belanda djuga ikut serta kapital Djerman dan Perantjis.

Bank ini bertudjuan memberi pursekot (wang muka) dan memberi dorongan pada perusahaan² perkebunan, perdagangan dan industri. Oleh bank ini dalam tahun 1885 didirikan **Nederlands-Indische Landbouw Maatschappij**, dan dengan perantaraan maskapai ini NIHB menguasai onderneming² kolonial. Dalam tahun 1863 itu djuga didirikan **Internationale Credit en Handelsvereniging Rotterdam**, sebagai bagian daripada **Rotterdamse Bank** jang sangat terikat pada kapital Djerman. Mula² jang diutamakan oleh bank ini jalah soal perdagangan dan komisi, di Indonesia maupun di-negeri² lain, tetapi ternyata kemudian perhatian bank ini terutama ditudjukan kepada menguangi dan mengontrol setjara langsung perusahaan² dagang dan perkebunan di Indonesia. Dalam tahun 1881 didirikan **Koloniale Bank** dengan program "menguangi perusahaan² pertanian dan industri".

Demikianlah kita lihat, bahwa dalam bank² kolonial di Indonesia tidak hanja ada kapital Belanda, tetapi djuga kapital negeri² lain. Disamping bank² kolonial diatas, djuga mengadakan operasi di Indonesia agen² bank asing bukan-Belanda diantaranya **Oriental Bank Corporation** dan **Chartered Bank of India, Australia and China**, jang terutama mengadakan operasi² dilapangan credit. Pengaruh jang terpenting daripada kapital luarnegeri dilakukan dengan melewati bank² dan konsern² finansil-industri Belanda. Sudah tjukup terkenal bahwa maskapai minjak **Royal Dutch (Koninkelijke Petroleum Maatschappij)** pokoknja adalah onderneming Inggris, sedangkan dalam perkebunan karet di Sumatra berkuasa kapital Amerika.

Pada umumnja bank² kolonial diatas timbul pada permulaan zaman muntjulnja kapital industri partikular sebagai badan jang mengurus credit dan keuangan. Tetapi dapat dipastikan, bahwa segera perusahaan² kolonial djatuh didalam kekuasaannja, ia mendjalan-
kan kontrolle jang menentukan atas perusahaan² koloni-

al itu. Sebagai tjontoh dapat kita lihat dari kenyataan⁹ sebagai berikut : Sudah sedjak tahun 1875 NHM mempunyai : 4 kebun kopi, 1 kebun tembakau, 1 kebun indigo; di Djawa ia mengontrol 3 pabrik gula, di Djawa dan Sumatera 3 perusahaan eksploitasi hutan. Demikian pula NHM telah membuka perusahaan minjak tanah yang pertama di Indonesia. Dalam tahun 1875 NHM ambil bagian dalam perkebunan, dalam kredit dan hipotik serta persekutuan untuk hasil bumi, yang seluruhnya berdjumlah 57 djuta florin. Tahun 1915 NHM mempunyai 9 kebun tebu dan 7 buah pabrik di Djawa. Selain daripada itu bank ini mengontrol : 22 pabrik gula, sedjumlah kebun kopi, 14 kebun tembakau, 12 kebun teh dan 14 kebun karet.

Dalam tahun 1895 timbul serangan krisis yang hebat, yang menghantjurkan sebagian besar kapitalis⁹ partikular, dan ini memberi kesempatan pada kapital finans untuk berkuasa sepenuhnya. Kekuasaan kapital finans ini berpusat pada segerombolan kaum uang di Amsterdam. Dengan ini berarti, bahwa sedjak tahun 1895 Indonesia mengindjak zaman imperialisme, jaitu tingkat tertinggi daripada kapitalisme, dimana kapital bank dan kapital industri berpadu menjadi kapital finans, dan monopoli daripada kapital finans ini menguasai kehidupan ekonomi dan politik Indonesia.

Sangat menarik hati, bahwa djustru NHM, yang didirikan sebagai alat kapital dagang monopoli dalam zaman sistim kerdja-paksa ("cultuurstelsel"), yang berkembang menjadi satu badan finansial kolonial yang paling berkuasa daripada zaman imperialis. Ini menunjukkan adanya perpindahan yang boleh dikatakan tjepat dari kapital dagang monopoli kepada kapital finans monopoli. Zaman antara kapital dagang monopoli dengan kapital finans monopoli adalah zaman industri partikular, dan zaman ini tidak lama di Indonesia, jaitu dari tahun 1870 sampai 1895.

Tidak lamaanja kapital industri partikular di Indone-

sia, atau lebih tepat djika dikatakan terlambatnja mulai kapital industri, disebabkan karena industri dinegeri Belanda adalah terbelakang djika dibandingkan dengan Inggris yang terkenal sebagai "bengkel dunia". Selama masa tahun 1840-1860 di Inggris sudah berlaku kongkurensi merdeka dan perdagangan bebas, dan politisi burdjuis di Inggris sudah tampil kemuka dengan tuntutan "kemerdekaan" untuk koloni, tetapi di Indonesia ketika itu masih meradjalela kerdjapaksa dan monopoli negara. Dan sebagai sudah diterangkan diatas, baru tahun 1870 negeri Belanda membuka kesempatan bagi kapital partikular dan perdagangan partikular untuk bekerdja di Indonesia.

Untuk menjamin keselamatan kapital yang diexport, seluruh daerah Indonesia harus ditundukkan dibawah kekuasaan Belanda setjara politik maupun setjara militer, dan kemungkinan⁹ yang tak terbatas bagi perkembangan kapital harus diselidiki. Untuk menundukkan seluruh Indonesia dibawah kekuasaan Belanda, maka dilakukanlah peperangan kolonial diberbagai bagian Indonesia. Di-mana⁹ timbul perlawanan⁹ sengit dari Rakjat, terutama dari kaum tani. Tetapi karena perlawanan⁹ kaum tani tidak mendapat pimpinan yang tepat, karena dichianati oleh kaum feodal, dan karena persendjataan yang lebih sempurna dari pihak Belanda, perlawanan⁹ kaum tani dapat ditindas di-mana⁹ dan ditetapkanlah kekuasaan Belanda di-daerah⁹ luar Djawa (di Djawa sudah lebih dulu dikuasai). Demikianlah pemerintah Belanda memperkuat atau meluaskan kekuasaannja di Bali (pertempuran penghabisan tahun 1908), di Lombok (perang tahun 1894-1895), di Sumbawa, Dampo, Flores, Boni (perlawanan penghabisan tahun 1908), Bandjarmasin (1906), Djambi (1907), Riau (1913), Tapanuli (Singa Mangaradja ke-10 tewas tahun 1907), Atjeh (perang 1873-1908).

Disamping tindakan⁹ politik dan kemiliteran, untuk menjamin keuntungan⁹ yang luar biasa bagi kapital

jang diexport, pemerintah Belanda mengadakan pemeriksaan^a dilapangan ilmu tanah, ilmu bumi, ilmu tumbuhan^a, ilmu chewan, dsb. Djuga dipeladjar adat-istiadat, bahasa, agama, kesenian dan sedjarah anak negeri. Pada tahun 1893-1898 diadakan pemeriksaan setjara ilmu di Kalimantan, dan tahun 1893-1903 di Sulawesi. Pengetahuan^a tentang alam dan tentang masjarakat Indonesia dipergunakan oleh kaum imperialis untuk kepentingan pertambangan, pertanian dan perkebunan, pemerintahan, dsb. Demikianlah ilmu pengetahuan dipakai oleh kaum imperialis untuk mengurus kekajaan alam Indonesia dan untuk terus memperbudak Rakjat Indonesia.

Imperialisme telah menghantjurkan "cultuurstelsel" dan monopoli-negara, karena sistim ini sudah tidak tjotjek lagi dengan tingkat kapitalisme jang sudah menjapai puntjaknja. Apa jang dimaksudkan oleh kaum liberal dengan sistim "baru" dan "kerdjja merdeka" kemudian berwujud sistim "baru" dalam mengeksploitasi dan "kerdjja merdeka" bagi kapital monopoli. Sedangkan bagi kaum buruh dan kaum tani, sebagaimana djuga dalam zaman "cultuurstelsel" dan monopoli-negara, jang tersedia hanjalah kemelaratan. Di-villa^a jang indah^a, di-hotel^a klas satu dan di-gedung^a di-kota^a besar jang bermandikan tjahaja listrik diwaktu malam, tinggallah kaum penghisap, jaitu orang Belanda dan orang^a Eropa lainnja. Dan disamping kemewahan jang luarbiasa itu hiduplah ber-djuta^a kuli bangsa Indonesia, jaitu jang diikat oleh kontrak^a jang berdasarkan "ordonansi kuli" (jang pertama untuk Sumatera Timur tahun 1880), dan djika mereka bekerdjja kurang keras sedikit sadsja, mereka mendapat petjut dengan rotan. Mereka terikat oleh apa jang dinamakan "poenale sanctie", jaitu ketentuan hukuman dari pemerintah Hindia Belanda bagi mereka jang menjalahi kontrak, misalnja bagi mereka jang menolak untuk bekerdjja atau jang melarikan diri karena tidak tahan siksaan.

Dari 100 kuli kontrak saban tahun meninggal 30 orang. Wanita^a muda tidak sedikit jang djuga diangkut ke-daerah^a perkebunan, djauh dari tempat kelahirannja, dengan upah beberapa sen sehari, dan mereka pada achirnja banjak terpaksa mendjalankan prostitusi.

Semuanja ini membuktikan, bahwa kaum imperialis telah mengganti "cultuurstelsel" dengan perbudakan setjara baru, antara lain perbudakan "poenale sanctie" untuk mendjamin tenaga-murah bagi onderne-ming (baru tahun 1931 "poenale sanctie" dihapuskan setjara ber-angsur^a).

Dalam zaman imperialis kedudukan Indonesia dalam hubungan ekonomi dunia antara lain jalah :

Pertama : sebagai sumber bahan mentah : Indonesia mengirimkan keluar negeri hasil^a perkebunan seperti karet, teh, tembakau, kopi, gula, kopra, kina, kapok, lada, rempah^a, dsb. Disamping itu djuga mengekspor hasil^a pertambangan seperti minjak tanah, bauxiet, timah, dll.

Kedua : sebagai sumber tenaga buruh jang murah : Kaum imperialis tidak hanja menggunakan tenaga murah daripada buruh "merdeka" untuk membangun djembatan^a, djalan^a kereta-api, pelabuhan^a, pembukaan daerah^a eksploitasi jang baru, dsb., tetapi mereka djuga menggunakan kuli kontrak, jang diambil dari daerah^a pertanian di Djawa jang sangat melarat untuk dipergunakan diluar Djawa jang kekurangan tenaga kerdjja.

Ketiga : sebagai pasar untuk mendjual hasil produksi negeri^a kapitalis : Jang terutama mendapat pasar di Indonesia jalah barang^a tekstil, mesin^a, barang^a keperluan pabrik, barang^a hasil kimia, dsb.

Keempat : sebagai tempat penanaman modal asing : Sebelum krisis tahun 1929, kapital Belanda jang tertanam di Indonesia lebih kurang tiga-per-empat daripada semua kapital jang tertanam di Indonesia (semuannya kira^a 6 miliar florin). Jang nomor dua besarnja jalah kapital Inggris, kemudian baru kapital Amerika

Serikat, Djepang, dll. Penanaman modal asing di Indonesia, dimana kekuasaan politik ada ditangan imperialis Belanda dan dimana kombinasi antara sistim penghisapan setjara kapitalis dan purba-kapitalis (sebelum-kapitalis) memungkinkan keuntungan kolonial yang luar biasa, adalah djuga berarti lebih membikin Indonesia menjadi negeri yang tergantung dan lebih memperkuat kedudukan imperialisme.

Salah satu tudjuan terpenting daripada politik kolonial kaum imperialis ialah memajukan industri negeri-nja sendiri. Oleh karena itu, politik kolonial dari imperialis menentang adanya perkembangan industri yang se-luas²nja di Indonesia, dan inilah sebabnja keradjinan tangan dari Rakjat tidak berkembang menjadi industri modern sebagaimana terdjadi di Eropa, dan inilah pula sebabnja mengapa kapital kolonial membatasi diri dengan hanya mendirikan industri pembantu untuk mengerdjakan bahan mentah dan hasil² lain guna diexport.

Industri nasional sangat terbatas perkembangannya, misalnja hanya meliputi: perusahaan menganyam topi, tikar, kerandang, dsb; yang sudah sedikit maju ialah perusahaan batik dan rokok kretek. Besarnya perusahaan batik sangat ber-matjam², ada yang mempunyai buruh 2 a 3 orang, ada jg. belasan dan puluhan, dan ada djuga yang sampai ratusan (di Djawa Tengah). Perusahaan² batik ini sangat tergantung pada importir² besar bangsa asing yang mendatangkan keperluan² perusahaan batik. Sebagaimana djuga perusahaan batik, perusahaan rokok kretek bekerja dengan alat² yang sederhana. Dengan sendirinja, perusahaan rokok kretek terus-menerus didesak kedudukannya oleh industri² rokok Eropa yang modern. Perusahaan² batik atau rokok kretek yang agak besar, umumnya dimiliki oleh orang² Arab, Tionghoa dan Eropa. Dengan demikian djelaslah, bahwa industri nasional belum berkenalan dengan mesin² modern, dan untuk kearah ini senantiasa akan

dihurangi oleh politik imperialis.

Indonesia adalah negeri yang kaya pelikan (barang tambang). Disamping batubara dan minyak tanah, bumi Indonesia kaya dengan besi, emas, perak, sink, manga-an, tembaga, chrom, air-rasa, jodium, asphalt, dll. Djadi sebenarnya Indonesia mempunyai sjarat² untuk pembangunan industri disegala lapangan. Tetapi oleh kapital kolonial di Indonesia hanya didirikan industri-pembantu untuk mengerdjakan bahan mentah dan hasil lain² guna diexport. Politik perampokan kolonial tidak ditudjukan untuk membikin maju alat² produksi guna kemajuan masyarakat Indonesia, tetapi ditudjukan untuk menguras kekayaan alam Indonesia se-banyak²nja dan dengan tjara² yang paling banyak mendatangkan untung. Industri yang termasuk maju ialah pabrik gula, pabrik remiling, pabrik teh, pabrik tembakau, penjaring minyak tanah, dsb. Disamping itu, untuk memelihara perusahaan² kolonial, didirikan bengkel² reparasi dan berbagai pabrik mesin ketjil, industri² untuk keperluan kereta-api, keperluan kendaraan bermotor, kapal, pelabuhan, dsb. Untuk memenuhi kebutuhan² orang Eropa didirikan perusahaan limun, bir, gas dan listrik.

Walaupun sistim kerdja-paksa dan monopoli-negara sudah hapus, dan ini membuka kesempatan bagi perkembangan daripada kapitalisme, tetapi politik kolonial daripada imperialis menghalangi perkembangan industri yang sewadarnja. Dibanding dengan negeri² Eropa yang sudah maju ekonominja, Indonesia adalah masih sangat terbelakang. Kira² empat-perlima dari seluruh Rakjat Indonesia masih mengerdjakan pertanian, sedang yang bekerja dilapangan industri besar dan ketjil, dilapangan perdagangan, pertambangan, transport, dll. seluruhnja hanya kira² seper-lima. Keadaan ini menunjukkan bahwa Indonesia, walaupun sudah ada perkembangan kapitalisme, adalah suatu negeri agraria, artinja negeri yang dilihat dari sudut ekonomi

adalah terbelakang dan djumlah produksi nasionalnja sebagian besar terdiri dari hasil produksi dilapangan agraria. Indonesia adalah negeri burdjuis ketjil, artinja negeri, dimana perusahaan^a pemilik ketjil, jaitu pertanian perseorangan jang kurang produktif, masih bertjokol.

BAB II

TIGA PERTENTANGAN POKOK DALAM TUBUH IMPERIALISME

Pertentangan antara buruh dengan kapital. Pertentangan antara imperialis jang satu dengan imperialis lainnja. Pertentangan antara nasion pendjadjah dengan Rakjat djadjahan.

Sedjak Indonesia dalam tahun 1895 mengindjak zaman imperialis, maka terdapatlah di Indonesia tiga pertentangan (kontradiksi) pokok dalam tubuh imperialisme itu sendiri. Tiga pertentangan pokok itu ialah :

1. pertentangan antara buruh dengan kapital, antara massa kaum buruh jang luas dengan grup^a ketjil jang sangat kaya, dan karena kajanja mereka berkuasa.
2. pertentangan antara berbagai grup finansiil (kaum uang) dan berbagai grup negara^a imperialis dalam perdjuangannja untuk mendapatkan sumber^a bahan mentah, untuk mendapat daerah^a asing.
3. pertentangan antara segenggam nasion jang berkuasa, jang "berkebudajaan", dengan beratus-ratus djuta bangsa djadjahan dan setengah djadjahan.

Mengenai pertentangan jang pertama, jaitu pertentangan antara buruh dengan kapital, dapat didjelaskan sebagai berikut :

Dalam buku Sanusi Pane, Indonesia Sepanjang Masa, antara lain diterangkan bahwa pada tahun 1923 ditaksir modal asing di Indonesia ada 2.650 djuta florin (rupiah Belanda). Untungnja pukul rata saban tahun

500 djuta. Untung ini sebagian besar mengalir keluar-negeri sebab disanalah pemegang² andil dan direksi.

Dari keterangan Sanusi Pane diatas djelaslah, bahwa kaum kapitalis monopoli, jang menguasai seluruh kehidupan ekonomi dan politik, berusaha untuk mendapat untung se-besar²nja dengan djalan memperbesar nilai-lebih, jang tidak boleh tidak mesti diikuti oleh penghisapan jang lebih hebat dan oleh penurunan tingkat hidup dari kaum buruh. Keadaan ini jang memaksa kaum buruh untuk terus-menerus mengadakan perdjuaangan melawan serangan² kapitalis monopoli terhadap tingkat hidupnya.

Dalam pertentangan antara buruh dan kapitalis monopoli, kaum kapitalis menggunakan negara kapitalis sebagai alatnja. Pada suatu keadaan, dimana mereka tidak mampu lagi mempertahankan kepentingan²nja setjara demokrasi parlementer, maka merekapun memfasiskan sistim negara. Dalam zaman imperialis, negara kapitalis tidak hanja memainkan rol sebagai polisi agen, tetapi djuga ia mendjadi diktator upah untuk kepentingan kaum monopoli.

Untuk membela kepentingan²nja, ada kalanja kaum buruh terpaksa mengadakan pemogokan² setjara massa. Dari mogok terhadap satu perusahaan, mendjadi mogok terhadap semua perusahaan jang satu djenisnja, dan selandjutnja jang ber-matjam² djenisnja. Dari mogok terhadap perusahaan kapitalis mendjadi mogok politik. Demikianlah pertentangan² antara buruh dgn. kapital, makin lama makin tadjam, dan ada kalanja kaum pemogok mesti berhadapan dengan negara kapitalis jang menggunakan kekuatan bersendjata untuk menindas pemogokan².

Adalah kewajiban dari tiap² pemimpin buruh, untuk mengatur agar aksi² kaum buruh : 1) dibenarkan dan masuk akal sebagian besar dari Rakjat sehingga mendapat simpati dan sokongannja; 2) dimulai dimana ke-

adaan sedang baik untuk massa dan kemungkinan mendapat sukses adalah besar; 3) dimulai dan diachiri pada titik jang paling tepat dan saat jang paling baik, ia tidak boleh merupakan perdjuaangan melawan musuh jang tidak ada ketentuan kapan selesainja.

Demikianlah sedikit keterangan tentang pertentangan jang pertama.

Mengenai pertentangan jang **kedua**, jaitu pertentangan antara imperialis jang satu dengan imperialis lainnja, dapat didjelaskan sebagai berikut :

Sebagaimana diterangkan diatas, karena kuatnja desakan aliran liberal, pemerintah Hindia Belanda terpaksa mengubah politik monopolinja dengan **politik pintu-terbuka (opendeur politik)**, artinja : Indonesia dibuka mendjadi lapangan exploitasi kaum modal dari segala bangsa. Sampai sebelum petjah perang dunia II jang menjerbu mendjalankan exploitasi di Indonesia, mengusahakan onderneming² erfpacht jalah modal Belanda, Inggris, Amerika, Djerman, Perantjis, Belgia, Italia, Norwegia, Swedia dan Djepang. Dengan mendjalankan politik pintu-terbuka ini pemerintah Hindia Belanda memperhitungkan dua keuntungan : 1) keuntungan jang langsung, berupa kenaikan hasil padjak; 2) keuntungan jang tidak langsung, jalah pertahanan bersama antara negeri² imperialis.

Karena banjaknja modal partikulir dari ber-bagai² negeri jang ditanam disini, djadi karena adanya kepentingan bersama, mereka akan bersama² pula mendjaga keamanan dan keselamatan Hindia Belanda, baik dari serangan dalam negeri jang berupa pemberontakan Rakjat, maupun jang berupa agresi dari negeri² imperialis lain. Ingat pengalaman pemberontakan tahun 1926 dimana imperialis Inggris dan Amerika aktif menindas pemberontakan tersebut; ingat pengalaman selama Revolusi Rakjat Indonesia (1945-1948) dan pengalaman Provokasi Madiun, dimana kaum imperialis dan kakitangannja berusaha menghantjurkan gera-

kan Rakjat jang revolusioner.

Walaupun kapitalis monopoli di Indonesia sama mengexploitasi alam dan Rakjat Indonesia, ini sama sekali tidak berarti bahwa antara kapitalis monopoli dan diantara negeri imperialis satu dgn. lainnja sudah tidak ada pertentangan lagi. Di-daerah jang mereka kuasai mereka memang berusaha melenjapkan kongkurensi merdeka dan menggantinya dengan monopoli mereka sendiri. Tetapi, mengingat wataknya dari kapitalisme jang sedjak lahirnja sudah mengandung kongkurensi merdeka, maka ini sama sekali tidak berarti bahwa pertentangan didalamnja sudah tidak ada lagi. Malahan pertentangan antara grup monopoli dan kekuasaan imperialis satu dengan lainnja, menjadi makin tadjam dari jang sudah. Salah satu puntjak daripada pertentangan jang tadjam ini kita alami dalam perang dunia ke-II, dimana dengan kekerasan Indonesia dirampas oleh imperialis Djepang dari tangan imperialis Belanda.

Pertentangan antara imperialis jang satu dengan imperialis jang lain, inilah jang menjadi sebab jang pokok daripada perang imperialis. Timbulnja pertentangan ini, dan dari situ timbulnja peperangan, adalah akibat daripada **perkembangan imperialisme jang tidak sama**. Lenin memang mengatakan, bahwa kapitalisme monopoli sedang menudju kehantjurannya, tetapi ini tidak berarti bahwa ia akan hantjur sekali gus seluruhnya. Kehantjuran sekali gus adalah tidak mungkin, karena perkembangan daripada imperialisme sendiri adalah tidak sama. Dan ini pulalah jang memungkinkan adanya sosialisme disatu negeri atau dibeberapa negeri, walaupun di-bagian lain dari dunia masih bertjokol sistim kapitalisme. Untuk mengkonsolidasi negeri dimana kemenangan sudah tertjapai, agar kekuatan ini bersama dengan kekuatan dari Rakjat negeri jang masih dikuasai oleh imperialis bisa merupakan kekuatan raksasa guna sama sekali menghantjurkan sistim impe-

rialisme, inilah jang membenarkan keterangan tentang mungkin dan perlunya sistim sosialisme dan kapitalisme hidup berdampingan setjara damai. Dengan demikian jelaslah, bahwa untuk melaksanakan sosialisme diseluruh dunia, perang bukan hanya tidak dibutuhkan tetapi mesti ditjegah dan dikutuk.

Apabila satu atau satu grup negeri kapitalis sudah mentjapai puntjak perkembangannya, maka imbalanced dunia menjadi berubah. Negeri kapitalis jang perkembangannya lebih tjepat, membutuhkan lebih banyak "Lebensraum" (ruang untuk hidup), padahal "Lebensraum" sudah selesai di-bagi pada akhir abad ke-19. Maka kekuasaan jang sudah mentjapai puntjak perkembangannya berusaha untuk "memperbaiki" atau untuk "mengubah" imbalanced dengan mem-bagi dunia kembali, dan ini sama artinya dengan mengadakan perang baru. Untuk mengubah imbalanced jang sudah rusak, imperialisme tidak mempunyai djalan lain ketjuali perang.

Selama dan sesudah perang dunia kedua produksi Amerika Serikat meningkat dengan sangat tjepat, sedangkan daerah pasar dan daerah bahan mentah baginja bertambah sempit (terutama dengan bebasnja Tiongkok). Inilah jang menjejabkan imperialis Amerika menjadi nekad untuk mendapatkan daerah pasar dan daerah bahan mentah jang sekarang sudah dikuasai oleh Rakjatnja sendiri atau dikuasai oleh negeri kapitalis jang lain dan ini pula keterangannya mengapa Amerika memelopori persiapan perang dunia ketiga. Karena bagi imperialis Amerika inilah satu-nja djalan keluar.

Djadi, negeri kapitalis monopoli sangat berbeda dengan negeri dimana kaum buruh dan Rakjat sudah berkuasa. Di negeri sosialis tidak terdapat penghisapan kapitalis dan tidak mengenal kapital export, dan negeri demokrasi Rakjat adalah negeri sedang dalam pembangunan sosialis, maka adalah sewadjarnya djika negeri sosialis dan demokrasi Rakjat tidak membutuh-

kan perang.

Demikianlah sedikit keterangan mengenai pertentangan kedua.

Mengenai pertentangan **ketiga**, yaitu pertentangan antara nasion pendjadjah dengan Rakjat djadjahan, dapat didjelaskan sebagai berikut :

Untuk melakukan exploitasi jang tidak kenal malu atas Rakjat djadjahan, kapitalis monopoli terpaksa mengadakan djalan² kereta-api, pabrik², bengkel, perkebunan² modern dan perusahaan² dagang. Djuga administrasi pemerintahan harus dibikin teratur.

Dalam buku Sanusi Pane jang tersebut diatas, anjara lain diterangkan, bahwa perusahaan² besar membutuhkan tenaga² jg. lebih pintar untuk pekerdjaan tatausaha rendah dan pertukangan. Pemerintah Belanda perlu djuga memakai tenaga² jang begitu. Berhubung dengan itu didirikanlah sekolah² rendah, kemudian sekolah² menengah pertama, sekolah teknik, sekolah menengah tinggi, sekolah guru. Djumlah sekolah² itu sedikit sekali, makin tinggi makin sedikit, sebab jg. dipertingkan jalah keperluan pemerintah Belanda dan perusahaan² asing, bukan pendidikan Rakjat. Jang tamat dalam tahun pengadjaran 1938-1939 hanja 96.159 orang pada sekolah rendah bumiputera dan 7.349 pada sekolah rendah Belanda-bumiputera, sedangkan bagi sekolah Belanda angkanja 3.743. Anak² Belanda djauh lebih sedikit daripada anak Indonesia (penduduk Belanda dalam tahun 1930 kira² hanja 200.000 djiwa - DNA). Perbandingan ini makin djelek di-sekolah² jang lebih tinggi (Mulo dan AMS buat anak Indonesia, HBS dan Lyceum buat anak Belanda). Sekolah tinggi baru pada waktu achir didirikan : Sekolah Tinggi Teknik, Sekolah Tinggi Kedokteran, Sekolah Tinggi Hukum (sebelum itu ada sekolah² jang bersifat menengah untuk kedokteran dan kehakiman). Buat pendidikan pegawai Pamong Pradja ada Osvia, kemudian Mosvia dan sekolah tinggi Sekolah Dokter Hewan ada satu dan satu

pula Sekolah Menengah Pertanian. Karena desakan perang dunia kedua didirikan tjepat² beberapa sekolah tinggi (antara lain : untuk pertanian dan kesusasteraan).

Kenjataan sebagai diterangkan oleh Sanusi Pane diatas memperlihatkan, bahwa pengadjaran bagi orang Indonesia terbelakang sekali. Hal itu dapat didjelaskan lagi dengan djumlah orang jang tahu membuatja menulis, tidak lebih dari 7%.

Dari keterangan² diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa imperialisme telah menimbulkan keadaan baru di Indonesia. Pabrik² gula, karet dll. serta pembuatan pelabuhan², kereta-api dan bengkel², membutuhkan tenaga kerdja penduduk. Alat² pemerintah jang makin meluas dan tumbuhnja perusahaan² partikular membutuhkan lapisan Rakjat jang mempunjai ketjerdasan dan jang tjakap mendjabat pekerdjaan jang serba modern.

Walaupun kaum imperialis berusaha sekuat²nja untuk mempertahankan hubungan feodal didesa, agar bisa mendapat keuntungan jang lebih besar dengan menggunakan tjara feodal untuk mendapat tenaga murah, tetapi pengaruh kapitalisme dapat djuga mendobraknja. Sekalipun industri di Indonesia hanja merupakan industri pembantu, tetapi inipun sudah melahirkan klas buruh, jang menurut sewadjarnja akan memimpin gerakan pembebasan Rakjat guna menghancurkan imperialisme dan achirnja djuga melenjapkan sama sekali sistim kapitalisme. Dalam tahun 1924 kaum buruh tetap di Indonesia telah mentjapai 21.6% daripada penduduk kota² besar di Djawa (seperti kota² Djakarta, Djatinegara, Bandung, Semarang dan Surabaya). Ini menundjukkan, bahwa kemadjuan industri dilima kota besar tersebut sudah mentjapai tingkat jang agak tinggi. Di-kota² ketjil di Djawa djumlah kaum buruh 19.8% daripada penduduk kota, sedangkan di-distrik² di Djawa terdapat 2.4% daripada penduduk.

Menurut statistik tahun 1930, penduduk Indonesia

jang hidup dari upah berdjumlah lebihkurang 6.000.000 (enam djuta). Dalam djumlah ini sudah dimasukkan buruh musiman jang sangat besar djumlahnja. Diantara jang enam djuta ini terdapat setengah djuta buruh modern atau proletariat, jang terdiri dari : 316.200 buruh transport, 153.100 buruh pabrik dan bengkel, 36.400 buruh tambang timah kepunjaan pemerintah dan partikulir, 17.100 buruh tambang batubara kepunjaan pemerintah dan partikulir, 29.000 buruh tambang minjak, 6.000 buruh tambang emas dan perak kepunjaan pemerintah dan partikulir. Selainnja adalah buruh pabrik gula, buruh perkebunan, berbagai golongan pegawai negeri (termasuk polisi dan tentara), buruh industri ketjil, buruh lepas, dsb. Perlu diterangkan bahwa jang terbesar jalah djumlah buruh industri ketjil (2.208.900) dan buruh lepas (2.003.200).

Djadi djelaslah, bahwa kapitalis monopoli telah melahirkan klas proletar, melahirkan kaum intelektuil bangsa Indonesia, membangunkan kesedaran nasional dan memperkuat gerakan kemerdekaan. Keadaan ini djuga menggugah dan menggerakkan massa kaum tani jang sangat besar itu djumlahnja. Dengan timbulnja klas proletar berartilah timbulnja klas baru jang paling maju, paling berdisiplin dan paling konsekwen. Klas inilah jang akan memberi sifat jang baru kepada perjuangan Rakjat Indonesia, sifat jang berlainan daripada waktu jang sudah².

Makin kuat gerakan revolusioner di-negeri² djadjahan dan setengah djadjahan, bertambah besarlah artinja bagi proletariat dunia. Gerakan revolusioner ini menggerowoti (ondermijnen) imperialisme setjara mendam dan membikin tanah² koloni dan setengah koloni, jang tadinja sebagai tjadangan imperialis, mendjadi tjadangan revolusi proletar.

Sedjak Revolusi Oktober 1917 gerakan kemerdekaan dari bangsa² djadjahan melihat Soviet Uni sebagai guru dan pahlawan kemerdekaan, dan dari Rakjat

Soviet mereka melihat bahwa sebenarnja tidak ada bangsa jang rendah deradjatnja, dan bahwa bangsa kulit putih dan bangsa kulit berwarna adalah sama, asal sadja mereka mendapat kesempatan jang sama untuk maju. Djuga gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia mendapat pengaruh dan peladjaran dari Revolusi Rusia tahun 1917.

Demikianlah sedikit keterangan mengenai pertentangan ketiga.

BAB III

GERAKAN BURUH INDONESIA SAMPAI PEMBERONTAKAN TAHUN 1926

ISDV sebagai pendorong perkembangan serikatburuh. Tahun 1919 berdiri vaksentral PPKB. Pemogokan buruh gula bulan Agustus 1920. Pada tanggal 23 Mei 1920 berdiri PKI. Tahun 1921 PPKB petjah mendjadi dua, tetapi tahun 1922 kaum Komunis berhasil mempersatukannya kembali dalam PVH. Pemogokan buruh pegadaian bulan Djanuari 1922 dan pemogokan buruh kereta-api bulan Mei 1923. Penjakit oportunist "Kiri" dalam gerakan buruh Indonesia. Pemberontakan kaum tani tahun 1926-1927. Likwidasiisme Tan Malaka. PVH lumpuh.

Pada permulaan abad ke-XX muntjullah di Indonesia klas^a baru yang menjiapkan diri untuk memegang pimpinan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan oleh imperialisme. Kenyataan menunjukkan, bahwa klas buruh Indonesia lebih dulu mengorganisasi diri setjara modern daripada klas^a lain. Baru sesudah kaum buruh mulai mengorganisasi diri dalam tahun 1905, kaum intelektuil bangsawan mengorganisasi diri dalam tahun 1908 (Budi Utomo) dan kaum dagang dalam tahun 1911 (Serikat Dagang Islam yang dalam tahun 1912 mendjadi organisasi massa yang luas dengan nama Serikat Islam).

Dalam gerakan buruh Indonesia yang lebih dulu mengorganisasi diri ialah amtenar^a dan pegawai^a peru-

sahaan pemerintah. Ini tidak mengherankan, karena dari kalangan inilah terdapat angkatan baru yang telah terpisah dari ikatan tradisi desa atau distrik, dan mereka mentjontoh orang Barat dalam mengorganisasi diri untuk mentjiptakan sjarat^a hidup dan sjarat^a kerdja yang lebih baik.

Dalam tahun 1905 berdirilah serikatburuh yang pertama dengan nama **SS-Bond**. SS-Bond didirikan hanya untuk pegawai SS, dan keanggotaannya tidak mengenal perbedaan bangsa. Ketiadaan pemimpin dari bangsa Indonesia ketika itu, menyebabkan pimpinan dipegang oleh pegawai^a SS bangsa Belanda. SS-Bond bukan organisasi buruh yang militant, dengan demikian tidak mungkin ia memenuhi keinginan kaum buruh.

Dengan berdirinya **Vereniging van Spoor- en Tram-personeel (VSTP)** di Semarang tahun 1908, maka banjaklah anggota^a SS-Bond yang pindah ke VSTP, dan ini achirnya menyebabkan SS-Bond mesti gulung tikar. SS tidak mau mengakui pengurus VSTP sebagai wakil buruh. Untuk berhadapan dengan SS dalam tahun 1912 dibentuk apa yang dinamakan "grup perwakilan", akan tetapi karena hasil perundingan dengan SS senantiasa tidak memuaskan, hilanglah kepertjaan kaum buruh akan manfaat "grup perwakilan" sematjam itu, dan menimbulkan kejakinan pada kaum buruh bahwa tiap^a perundingan mesti disertai kekuatan yang dapat memaksa madjikan mengabulkan tuntutan kaum buruh.

Dengan datangnya seorang Belanda totok **H.J.F.M. Sneevliet** (1883-1942, ia mati ditembak nazi-Djerman dinegeri Belanda) di Semarang tahun 1913, dan ia datang sebagai sekretaris suatu perkumpulan dagang. VSTP mendapat bantuan yang sangat besar artinja, karena Sneevliet adalah seorang propagandis yang bisa dipertjaja oleh gerakan revolusioner dan seorang yang mengerti soal^a serikatburuh. Walaupun kemudian ternyata, bahwa Sneevliet menjelewang dari Marxisme,

X
ia dihindangi oleh penyakit "Kiri", dan ini memang sangat berpengaruh pada gerakan revolusioner Indonesia dan terutama pada PKI, tetapi ia adalah seorang yang memulai menanamkan kesadaran sosialis pada pemimpin² Rakjat Indonesia. Pengaruh Sneevliet besar atas VSTP, dan dalam perkembangan selanjutnya Sneevliet adalah seorang pemimpin VSTP yang penting.

Dengan teman² sefahamnya bangsa Belanda, antara lain J.A. Brandsteder, P. Bergsma dan H.W. Dekker, dalam bulan Mei 1914 di Semarang didirikannya ISDV (*de Indische Sociaal Democratische Vereniging*) yang bertudjuan menebarkan Marxisme dikalangan kaum buruh dan Rakjat Indonesia. Dalam ISDV terhimpun tenaga² intelektual bangsa Indonesia dan Belanda, dan ISDV adalah tempat dimana bangsa Indonesia mula² beladjar Marxisme. Anggota ISDV tidak banyak, akan tetapi giat dan tjerdas, dan dengan anggota²nya yang tidak banyak itu ISDV dapat merasuk ke-tengah² Rakjat Indonesia dan dengan demikian dapat mempengaruhi organisasi² lain. ISDV berpengaruh atas SI (Serikat Islam), dan dengan sendirinya atas serikatburuh² yang dipimpin oleh orang² SI. ISDV berusaha keras untuk mendirikan dan mempersatukan serikatburuh². ISDV melahirkan pemimpin² revolusioner bangsa Indonesia, dan sajak kiri dari ISDV inilah yang kemudian memelopori berdirinya **Partai Komunis Indonesia (PKI)** dalam tahun 1920. Tulisan Sneevliet dalam harian Semarang "De Indier" tanggal 19 Maret 1917, dengan nama "Zegepraal" ("Kemenangan"), yang memudji Revolusi Rusia bulan Februari 1917 dan yang menganjurkan kepada Rakjat Indonesia supaya mengambilnya sebagai teladan, telah menjejabkan Sneevliet dituntut dan ini dijadikan alasan oleh perkumpulan dagang dimana ia bekerdja untuk mengeluarkan Sneevliet dari pekerdjaannya. Tetapi justru ini yang lebih mendekatkan Sneevliet kepada Rakjat Indonesia, karena kemudian ia sepenuhnya mengabdikan diri pada VSTP,

sebagai sekretaris dan propagandis, dan diapun hidup dari VSTP.

Sesudah ISDV didirikan, di-mana² timbul serikatburuh sebagai djamur dimusim hudjan. Dalam tahun 1916 pegawai bangsa Indonesia dari Djawatan Pegadaian Negeri mengorganisasi diri dalam serikatburuh pegadaian dengan nama PPPB (**Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera**). Kedjadian ini jalah tiga tahun sesudah pegawai² bangsa Belanda membentuk perkumpulannya sendiri.

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan berdirinya PPPB, didirikan serikatburuh BOW (*Burgelijke Openbare Werken, Pekerdjaan Umum*) dengan nama VIPBOW (*Vereniging Inheemse Personeel BOW*); djuga didirikan serikatburuh guru bangsa Indonesia seperti PGHB (**Perserikatan Guru Hindia Belanda**), PGB (**Perhimpunan Guru Bantu**) dan PGAS (**Perserikatan Guru Ambachtsschool**); buruh djawatan tjandu berserikat dalam *de "Opiumregiebond van Nederlands-Indië"* (1915) dan *de "Opiumregiebond Luar Djawa-Madura"* (1917); buruh douane berserikat dalam **Perhimpunan Bumiputera Pabean** dan banyak lagi serikatburuh² yang ketjil². Sebagian besar dari serikatburuh² ini diakui sebagai "rechtspersoon".

Pada umumnya yang menjadi anggota² serikatburuh² yang disebutkan diatas jalah buruh² rendahan, karena pada waktu itu boleh dikata sangat jarang orang Indonesia menduduki tempat yang penting dalam djawatan. Dan djika ada yang menduduki tempat yang penting, maka iapun memisahkan diri dari masjarakat bangsanja sendiri dan dalam pergaulannya menggolongkan diri pada orang² Barat.

Adanja kehidupan berserikat setjara modern dalam masjarakat Indonesia, seperti yang tumbuh dikalangan pegawai² negeri, menggugah golongan² buruh partikulier untuk djuga mengorganisasi diri dalam serikatburuh. Demikianlah dalam tahun 1919 di Djokja didirikan

PFB (Personeel Fabrieks Bond) jang mula² hanja bertudjuan memberi bantuan kepada keluarga buruh pabrik gula di Djokja. Tetapi kemudian PFB meluas keseluruhan Djawa dan tudjuannja djuga diperluas, tidak lagi hanja terbatas memberi bantuan pada keluarga. Pemimpin PFB jang terkemuka jaitu **Raden Mas Surjopranoto**, terkenal dengan djulukan "stakingskoning" ("radja-pemogok"), karena dibawah pimpinan PFB, dalam tahun 1920 telah terdjadi pemogokan besar jang diikuti oleh ratusan ribu kaum buruh gula.

Sedjak tahun 1916 ISDV sudah mengusahakan berdirinja vaksentral (gabungan serikatburuh²). ISDV berpendapat, bahwa perlawanan terhadap kaum kapitalis akan lebih mudah diatur dan akan lebih hebat pukulannja djikalau kaum buruh Indonesia sudah terga-bung dalam vaksentral. Oleh **Semaun**, seorang murid Sneevliet jang militant ketika itu, setelah usahannja gagal untuk membentuk vaksentral dengan melalui VSTP, pada pertengahan tahun 1918 sekali lagi diusahakannja dengan mengundang pengurus² serikatburuh ke Semarang. Masaalah jang hangat ketika itu antara lain ialah soal "duurtetoeslag". Tetapi djuga usaha tahun 1918 ini tidak mentjapai hasil, karena jang mengirinkan wakil tjuma VSTP (dimana Semaun sendiri jang mendjadi pemimpinnja) dan PPPB. Serikatburuh² lain kelihatannja belum berani mengikuti djedjak orang² ISDV jang sudah terang bertentangan dengan pemerintah kolonial.

Kemenangan Revolusi Oktober Rusia tahun 1917 menimbulkan kejakinan dan kegembiraan jang lebih besar dikalangan ISDV dalam mengadakan agitasi dan propaganda tentang revolusi dan sosialisme. Dengan dibantu oleh Brandsteder, jaitu sekretaris daripada organisasi pegawai marine dan redaktur surat kabar serdadu dan matros, Sneevliet djuga mengadakan propaganda dikalangan serdadu dan matros. Dengan demikian semangat perlawanan djuga timbul dikalangan angkatan bersendjata. Atas andjuran Sneevliet di

Surabaya dibentuk sematjam Soviet, jaitu "Dewan Matros dan Marine", dan kepada serdadu² diandjurkan untuk djuga membentuk dewan sematjam itu. Kegiatan² ini dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda. Karena itulah Sneevliet diusir dari Indonesia berdasarkan putusan Pemerintah 5 Desember 1918. Kemudian djuga kawan²nja diusir, antara lain Brandsteder, Bergsma, Baars, dll. Tetapi pengusiran² ini tidak banjak artinja, karena dari kalangan bangsa Indonesia sudah timbul pemimpin² jang revolusioner.

Usaha² sesudah tahun 1918 menundjukkan hasil² jang baik dalam usaha membentuk vaksentral. Dalam kongres PPPB di Bandung dalam bulan Mei 1919 pemimpin SI **Raden Sosrokardono**, jang djuga mendjadi pemimpin PPPB, mengandjurkan supaya semua serikatburuh digabungkan setjara federatif dalam satu badan sentral, djadi mengandjurkan adanja vaksentral. Dalam kongres ini ada persesuaian pendapat antara Semaun dan Sosrokardono, jaitu tentang perlunja ada vaksentral dan tentang tudjuan gerakan buruh untuk mentjapai pemerintah sendiri, dan mengubah masjarakat kapitalis mendjadi masjarakat sosialis.

Tentang andjuran² dalam kongres PPPB di Bandung, djuga dijelaskan oleh Surjopranoto dalam kongres SI ke-empat di Surabaya, tetapi dengan interpretasinja sendiri. Surjopranoto antara lain menerangkan, bahwa kemenangan perjuangan klas dalam membikin alat produksi mendjadi milik umum tidak harus ditjapai dengan aksi² bersendjata, tetapi dengan paksaan batin, dengan perundingan dimuka ramai dan djika perlu dengan pemogokan. Selandjutnja diterangkannja, bahwa serikatburuh akan mendjadi **Eerste Kamer** dari perwakilan Rakjat, dimana duduk wakil² serikatburuh dan serikattani; sedangkan Tweede Kamer merupakan perwakilan partai² politik. Kedua kamer inilah jang akan merupakan "Dewan Rakjat sesungguhnya", dan dengan ini dapat beraksi menentang modal dan pen-

djadjahan asing.

Walaupun ada perbedaan^a pendapat, tetapi ISDV maupun SI pada waktu itu sependirian tentang perlunya ada satu vaksentral. SI mengusulkan nama **PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh)** sedangkan kaum sosialis kiri dari ISDV menginginkan nama **Revolutionare Socialistische Vakcentrale**. Tentang nama ini kaum sosialis kiri achirnja mengalah dan menerima nama PPKB. Achir Desember 1919, djadi tidak lama sesudah achir perang dunia 1, dalam pertemuan wakil^a serikatburuh di Djokjakarta, berdirilah vaksentral PPKB, dimana didalamnja tergabung serikatburuh^a yang dibawah pengaruh ISDV dan SI. Dalam pertemuan ini djuga dibentuk komisi yang diwadjabkan menjusun Peraturan Dasar vaksentral, yang antara lain terdiri dari pemuka^a kaum buruh seperti Surjopranoto, Sosrokardono, Alimin dan Reksodiputro. Komisi ini mengadakan rapat^anja dikota Bandung, kota dingin.

Kedadaan sesudah perang sangat menguntungkan kapitalis besar asing karena sangat banjak permintaan luarnegeri akan barang^a export Indonesia. Sebagai tjontoh, perseroan dagang bangsa Belanda, Handelsvereniging Amsterdam (HVA) telah dapat mengeluarkan 50% dividen untuk tahun 1919, dan 60% untuk tahun 1920. Harga gula meningkat luarbiasa, dari f. 5.25 per pikul dalam bulan Djuli 1918 mendjadi f. 66.— dalam bulan Mei 1920; kopi Robusta dari f. 16.12 per pikul dalam bulan Djuli 1918 mendjadi f. 76.25 dalam bulan November 1919. Tetapi sebaliknya bagi Rakjat, tahun^a pertama sesudah perang berarti musim kelaparan. Kemiskinan berdjangkit, kesukaran memuntjak, sedang ketidak-senangan Rakjat terus bertambah, terutama tidak senang pada bangsa Eropa. Upah riil kaum buruh sangat turun karena naiknja harga barang^a import, termasuk barang^a keperluan se-hari^a, sedangkan upah tidak ikut naik atau naiknja tidak sepadan dengan naiknja

harga barang.

Dalam tahun^a sesudah perang terdjadilah beberapa pemogokan dan pertjobaan pemogokan, sebagian diluar pertjampuran PPKB.

Kedadaan upah yang sangat buruk menjejalkan pengurus PFB merentjanakan aksi buruh gula. Dalam bulan Maret 1920 pengurus PFB menjampaikan surat edaran kepada direksi dan administrasi onder-neming^a dan kepada sindikat^a gula, dimana diadjukan permintaan supaya PFB diakui sebagai wakil buruh, dan bersamaan dengan itu djuga dituntut perbaikan upah bagi buruh yang nasibnja sangat tjelaka. Dimana^a terdjadi pemogokan besar^an, yang diikuti oleh ratusan ribu buruh gula, di Jawa Timur dan Jawa Tengah, umumnja di-perusahaan^a gula HVA. Pemogokan yang hebat ini telah memaksa sindikat^a gula mengadakan kontak dengan fihak buruh untuk berunding. Semaun dari vaksentral PPKB memerintahkan supaya pemogokan dihentikan. Akan tetapi Surjopranoto tidak mau mentaati perintah PPKB dan terus mengadakan agitasi^a untuk melandjutkan aksi. Malah pada 9 Agustus 1920 dikeluarkan ultimatum untuk mengadakan mogok umum. Oleh pemerintah Hindia Belanda agitasi Surjopranoto ini dianggap membahayakan apa yang dinamakannja "ketertiban umum." Larangan mengadakan aksi dikeluarkan, karena menurut pemerintah aksi ini "bukan untuk perbaikan nasib kaum buruh, tetapi sebetulnja aksi politik untuk mengadakan perusuhan". Tetapi yang lutju, yang membuktikan bahwa aksi^a kaum buruh adalah aksi perbaikan nasib, ialah bahwa bersamaan dengan larangan mengadakan aksi pemerintah djuga "mengingatnkan madjikan untuk sebaiknya menambah upah buruh". Pemerintah meletakkan tanggungjawab pada pengurus PFB djika kedadjian pemogokan umum. Achirnja, Surjopranoto kena delik dalam bitjara dan dihukum dua bulan, tetapi ini sudah tjukup lama untuk

membikin PFB menjadi lumpuh sejak bulan Agustus 1920.

Meletusnya Revolusi Sosialis Oktober tahun 1917 di Rusia dan menangnya revolusi ini, memberi inspirasi, kesadaran dan pandangan baru pada Rakjat Indonesia, terutama pada kaum buruh dan pada kaum intelektual Indonesia yang paling maju. Revolusi Sosialis Oktober sangat mempengaruhi ISDV. Revolusi Oktober tidak hanya merupakan suluh dan harapan bagi Rakjat Indonesia, tetapi ia juga memberi pelajaran pada Rakjat dan klas buruh Indonesia tentang lahirnya suatu Partai type baru, yaitu bentuk tertinggi daripada organisasi klas dari proletariat yang bersendjatakan Marxisme-Leninisme, yang mempunyai anggota dari klas pekerdja yang paling sadar, yang mempunyai disiplin badja yang sangat kuat, yang memakai metode self-kritik dan yang berhubungan erat dengan massa. Partai ini adalah partainya Lenin, Partai Komunis. Dalam rapat-tahunan ISDV yang ke-7, yang diadakan digedung SI Semarang pada tanggal 23 Mei 1920, atas usul tjabang Semarang, ISDV dilebur menjadi PKI. Usul ini diterima boleh dikata dengan suara bulat (33 setuju, 1 blangko dan 2 tidak setuju). Anggota Pengurus Besar harian yang pertama terdiri dari : **Semaun**, ketua; **Darsono**, wakil-ketua; **Bergsma**, sekretaris; **Dekker**, bendahara; dan **Baars**. Anggota Pengurus Besar diluar Semarang ialah : **J. C. Stam** di Tuban, **Dengah** dan **C. Kraan** di Surabaja dan **Sugono** di Bandung. Untuk redaktur madjalah Partai "Het Vrije Woord" (dalam bahasa Belanda) ditetapkan Baars dan Bergsma, sedangkan untuk "Suara Rakjat" ditetapkan Darsono dan Dengah. Dalam bulan Desember tahun 1920 itu juga PKI menggabungkan diri pada Komintern (Komunis Internasional).

Berdirinja PKI pada tanggal 23 Mei 1920 adalah sangat penting bagi klas buruh Indonesia, karena sejak itulah klas buruh Indonesia mempunyai Partainya

sendiri. Untuk gerakan kemerdekaan nasional, berdirinja PKI juga mempunyai arti yang sangat besar, karena dalam perjuangan selanjutnya dibuktikan, bahwa PKI tidak hanya memimpin dan memperjuangkan kepentingan klas buruh, tetapi juga memimpin dan memperjuangkan kepentingan² klas² lain, sehingga PKI merupakan Partai yang berdiri didepan dalam perjuangan nasional untuk menghapuskan imperialisme dan feodalisme di Indonesia.

Kongres PPKB yang pertama diadakan di Semarang pada tanggal 1 Agustus 1920. Kongres ini dihadiri oleh 22 serikatburuh, dengan anggota seluruhnya 72.000. Dalam kongres ini mulai kelihatan pertentangan antara aliran revolusioner yang diwakili oleh kaum Komunis dan aliran reformis yang diwakili oleh beberapa pemimpin SI. Semaun dan kawan²nya menjesali **Surjopranoto** yang dalam aksi melawan pabrik gula telah mengetjilkan rol daripada vaksentral, dan tidak menghubungkan aksi² buruh gula dengan soal² politik menghantam pendjadjahan. Surjopranoto menjatakan keberatannya jika vaksentral mentjampuri soal² dalam PFB. Dalam kongres ini juga menjadi perbintjangan hangat tentang tempat kedudukan vaksentral. Kaum Komunis menghendaki supaya berkedudukan di Semarang, sedang orang² SI menghendaki di Djokja, yaitu kota pusat SI. Diputuskan untuk sementara tempat kedudukan PPKB di Djokja, dimana bertempat tinggal 4 dari 7 pengurus besar PPKB. Susunan pengurus PPKB sesudah kongres ialah : Semaun sebagai Ketua, R.M. Surjopranoto sebagai Wakil Ketua dan Hadji Agus Salim sebagai Sekretaris.

Kaum Komunis mempunyai pengaruh yang sangat besar didalam PPKB. Dalam hal ini besar sekali rol dari VSTP yang militant itu. Sejak mulai berdirinja, PPKB sudah dihadapkan dengan pekerdjaan yang banjak, karena di-mana² timbul pemogokan².

Dalam bulan Agustus 1920 itu juga pada maskapai

SCS (Semarang-Cheribon-Stoomtram Maatschappij) timbul konflik antara buruh dengan maskapai. Segera VSTP menjampai ultimatum pada direksi maskapai. Direksi menjanggupi memberikan sjarat² kerdja yang sama seperti yang berlaku bagi pegawai SS, tetapi maskapai menolak tuntutan² VSTP yang lain. VSTP menganggap putusan direksi ini tidak tjukup, dan menuntut kenaikan upah serta 8-djam kerdja sehari. Suasana mendjadi hangat, dan dalam keadaan demikian timbul provokasi, jaitu petjahnja pemogokan diseluruh djalan kereta-api Semarang-Tjirebon dengan tidak setuju VSTP. Tetapi pengaruh VSTP atas kaum buruh sangat besar, dan dengan tindakan yang diambil VSTP pemogokan bisa dihentikan dengan segera.

Djuga di Sumatera Timur pada permulaan September 1920 timbul pemogokan dikalangan kaum buruh kereta-api DSM (Deli Spoor Maatschappij), yang djuga menuntut kenaikan upah. Aksi mogok ini djuga mendjalar sampai kepada buruh BPM (Bataafse petroleum Maatschappij) di Pangkalan Brandan. Dengan dipenuhinja tuntutan buruh, segera pemogokan berhenti.

Dalam bulan November 1920 terdjadilah sedjumlah konflik perburuhan di Surabaya. Atas usaha pemimpin² dari PFB dapat diorganisasi buruh pendjahit, buruh pelabuhan dan buruh perusahaan teknik, dan serikat-buruh² ini digabungkan kedalam vaksentral setempat. Tuntutan kenaikan upah ditolak oleh madjikan, menjebabkan petjahnja pemogokan² diberbagai perusahaan. Pemogokan² ini ada djuga mengakibatkan penutupan perusahaan² (lockouts), sampai tuntutan kaum buruh dikabulkan, dan ada yang memakan waktu sampai dua bulan. Baru pada akhir Desember 1920 kaum buruh perdagangan dan industri di Surabaya bekerdja kembali, dan keadaan ini membikin ramai kembali kehidupan perusahaan yang tadinja dibikin sunji oleh pemogokan.

Pemogokan² dalam tahun 1920 umumnja berachir

dengan kemenangan kaum buruh. Kemenangan² ini memberikan semangat dan kegembiraan berdjuaug pada kaum buruh, mendidik kaum buruh akan pentingnja organisasi dan disiplin, dan membukakan pada kaum buruh dan Rakjat umumnja kebobrokan daripada peraturan perburuhan kolonial dan pemerintah kolonial. Karena aksi² kaum buruh pemerintah terpaksa membitjarakan soal upah minimum bagi kaum buruh. Untuk ini oleh pemerintah dibentuk satu **Komisi Perburuhan**. Tetapi setelah Komisi ini memberikan laporannja pada akhir Djuni 1920, pemerintah kemudian menjatakan pendapatnja, bahwa laporan itu "lebih bersifat menjatakan keinginan² teoritis dari Komisi daripada menjatakan apa yang mungkin dalam praktek". Menurut pemerintah, peraturan upah-minimum yang diusulkan oleh Komisi adalah "setjara teori tidak bisa dipertahankan dan dalam praktek tidak bisa dilaksanakan". Dengan perkataan lain, pemerinth tidak bertindak apa² untuk perbaikan nasib buruh.

Kemadjuan² yang ditjapai oleh gerakan buruh membikin kuatir fihak pemerintah. Yang lebih menguatirkannja lagi jalah, bahwa pengaruh kaum Komunis dalam serikatburuh² makin lama makin besar. Dengan melalui orangnja pemerintah Hindia Belanda berusaha memetjah-belah gerakan buruh, dan mempengaruhi aliran² tertentu dalam SI. Dengan segala djalan pemerintah Hindia Belanda mempertadjam pertentangan antara kaum Komunis (PKI) dengan golongan Islam (SI) untuk memetjah PPKB. Aliran reformis dalam PPKB dengan sendirinja mendapat sokongan dan dorongan dari pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian pertentangan antara aliran revolusioner dengan aliran reformis makin lama makin tadjam dalam PPKB.

Atas usul **VIPBOW** dengan maksud untuk "meredakan pertentangan" yang ada dalam PPKB, pada tanggal 18-20 Djuni 1921, di Djokja diadakan rapat umum yang

dihadiri oleh semua anggota² PPKB. Tetapi dalam rapat ini, pertentangan bukan makin reda, tetapi malahan mendjadi lebih tadjam dan lebih terang. Disatu fihak kaum Komunis belum mampu mendjalankan taktik jang tepat untuk menggalang front persatuan buruh jang luas, dan difihak lain orang² seperti Hadji Agus Salim cs. dan pembesar² PID (djawatan penjelidik politik Hindia Belanda) dengan segala djalan menggunakan tiap² kesempatan untuk menimbulkan kekatjauan dan perpetjahan. Dalam rapat ini PPKB petjah mendjadi dua, disatu fihak "golongan Semarang" jang dipimpin oleh kaum revolusioner, dan difihak lain "golongan Djokja" jang dipimpin oleh kaum reformis **Hadji Agus Salim cs.**

Dibawah pimpinan kaum Komunis didirikan vak-sentral baru dengan nama **Revolutionaire Vakcentrale**, jang berkedudukan di Semarang. Dalam RV ini terga-bung 14 serikatburuh, diantaranya VSTP, serikatburuh pelabuhan, tambang, supir, pertjetakan, pendjahit, dsb., dengan VSTP sebagai tulangpunggungnja. RV dipimpin antara lain oleh Semaun, P. Bergsma, Najoan, dll.

Surjopranoto bersama Hadji Agus Salim meneruskan aktivitetnja dengan nama PPKB di Djokja, dengan PPPB sebagai tulangpunggungnja.

Kaum Komunis berhasil menarik serikatburuh² jang penting, seperti VSTP, serikatburuh pelabuhan, tambang, dsb. kedalam RV, tetapi dua serikatburuh jang besar dan penting, jaitu serikatburuh gula (PFB) dan PPPB, tidak dapat ditariknja. Kedua serikatburuh ini berada dalam pimpinan kaum reformis. Demikian djuga serikatburuh guru berada dalam pimpinan kaum reformis. Keadaan ini mempunjai pengaruh pada gerakan buruh selandjutnja.

Dalam bulan Agustus 1921 terdjadi pemogokan buruh pelabuhan di Surabaya, jalah sebagai perlawanan terhadap madjikan jang mau menurunkan upah buruh. Kedjadian ini segera ditjampuri oleh RV dengan mengirinkan Semaun ke Surabaya.

Pada tanggal 11 Djanuari 1922 terdjadi pemogokan buruh pegadaian dibawah pimpinan PPPB (anggota PPKB), mula² di Djokja tetapi dua minggu kemudian mendjalar kebeberapa daerah di Djawa. Berbeda dengan pemogokan² lain jang sudah diterangkan diatas, pemogokan ini bukan karena soal upah, tetapi disebabkan oleh sikap pegawai atasan bangsa peranakan Belanda jang bertindak se-wenang² terhadap pegawai Indonesia. Dengan perkataan² jang tidak menjenangkan, pegawai² atasan jang umumnja terdiri dari bangsa Belanda menjuruh pegawai² bangsa Indonesia mengerdjakan pekerdjaan² jang dianggap hina, misalnja disuruh mengangkat barang² jang akan dilelang kedalam los. Pegawai menuntut supaya ada pesuruh jang khusus untuk mengangkat barang² itu, dan menuntut supaya dikalangan pegawai, djuga oleh pegawai atasan, dipergunakan bahasa Djawa Dipo jang demokratis. Tuntutan² ini tidak mendapat perhatian, dan inilah jang menjebabkan pemogokan besar² an. 79 dari 360 rumahgadari ambil bagian dalam pemogokan ini. Untuk menindas pemogokan ini, pemerintah Hindia Belanda menggunakan ketentuan hukuman-djabatan, artinja kepala² pegadaian begitu sadja bisa memberhentikan pegawai jang dianggap "menolak pekerdjaan" atau "mengadakan tentangan". Dengan demikian kaum pemogok, sedjumlah kira² 1.000 orang, jaitu 20% daripada seluruh pegawai djawatan pegadaian, dipetjat dari pekerdjaannja.

Aksi kaum buruh pegadaian jang hebat ini mengalami kegagalan, karena pemimpin PPPB jang reformis tidak memberikan tuntunan jang tegas. Pemimpin² terlalu banjak berusaha keatas, misalnja beraudiensi kepada pembesar² negeri, dan kurang mengorganisasi serta membangunkan semangat kaum pemogok. Kesalahan jang besar lagi jalah, bahwa kaum pemogok tidak dikumpulkan setjara teratur untuk diberi pendjelasan tentang djalannja dan hasilnja perundingan serta bagaimana sikap pemogok selandjutnja. Ketika kaum

pemogok dipetjat dari pekerdjaannja, samasekali tidak ada petundjuk dari pimpinan apa jang harus mereka lakukan selandjutnja; dengan putusan sendiri² ada jang pergi kedesa untuk bertani, ada jang berdagang, ada jang mentjari pekerdjaan lain, dan sebagian mengabdikan diri sepenuhnya pada organisasi revolusioner. Keadaan jang tidak teratur ini, oleh reaksi dan kaum reformis kemudian dipergunakan untuk me-nakutⁱ kaum buruh, terutama buruh pegadaian, agar tidak berani mengadakan aksi.

Hal jang sangat baik jalah, bahwa dalam menghadapi pemogokan buruh pegadaian jang ditindas oleh pemerintah Hindia Belanda, baik fihak RV maupun fihak PPKB, ke-duaⁿja mengeluarkan pernyataan tentang betapa pentingnja pemogokan ini dan menyerukan supaya seluruh kaum buruh Indonesia menjokong pemogokan, dan dinjatakan djuga supaya kaum buruh bersiap³ agar se-waktu² diperlukan bisa mengadakan pemogokan umum. Diberbagai tempat diorganisasi rapat² penerangan dimana djuga didjelaskan kebobrokan pemerintah kolonial. Pemerintah menganggap ini sudah "keterlaluan" dan berpendapat bahwa hak berapat sudah digunakan tidak sebagaimana mestinja. Aktivitet kaum buruh dianggap mengganggu "ketertiban umum" dan atas dasar inilah didaerah Djokjakarta hak berapat dipersempit. Disamping itu, beberapa pemimpin buruh, antara lain P. Bergsma, dipisahkan dari gerakan buruh Indonesia dengan djalan mengeluarkannja dari Indonesia.

Semaun tidak ikutserta dalam memimpin pemogokan pegadaian, karena dalam bulan Oktober 1921 dia pergi keluarnegeri untuk menghadiri kongres kaum buruh Timur Djauh di Moskow, dimana dibitjarakan djuga tentang organisasi² buruh di-negeri² djadjahan dan setengah djadjahan. Dia baru datang pada achir Mei 1922.

Sepulangnja Semaun dari luarnegeri, PKI bertambah

giat lagi berusaha mempersatukan kaum buruh Indonesia, dan dalam pekerdjaannja PKI lebih ber-hati². Dikalangan PKI mulai dibitjarakan tentang pentingnja memperhatikan sifat² khusus daripada revolusi Indonesia, bahwa tiap² negeri mempunjai djalanⁿja sendiri dalam menudju ke Komunisme, dihubungkan dengan perkembangan ekonomi, politik, kebudayaan dan tradisi Rakjat tiap² negeri. Tetapi ternyata kemudian, bahwa soal memperhatikan sifat² khusus revolusi Indonesia masih belum konsekwen diperhatikan, dan kesalahan² jang bersifat "kiri" masih terus dibikin (antara lain putusan Kongres PKI tahun 1924 di Djokja, dan laporan Semaun pada pleno Komintern tahun 1925).

Atas inisiatif anggota² PKI, pada tanggal 25 Djuni 1922 di Surabaja diadakan rapat bersama dari serikat-buruh², dimana dalam rapat itu dinjatakan perlunya diadakan fusi antara Revolutionaire Vakcentrale dengan PPKB. Usaha ini berhasil, dengan tertjapainja fusi dalam rapat jang sengadja diadakan untuk itu di Madiun pada tanggal 3 September 1922. Demikianlah perpetjahan dalam gerakan buruh bulan Djuni 1921, sebagai hasil pekerdjaan memetjahbelah dari elemen² reaksioner, dapat kembali dipersatukan atas usaha kaum Komunis dalam satu vaksentral jang diberi nama PVH (Persatuan Vakbond Hindia). Dalam PVH tergabung VSTP, PPPB, PFB, Kweekschoolbond, PGB (Perhimpunan Guru Bantu), dll. serikatburuh, pemerintah maupun partikulir, dan seluruhnja meliputi 20.000 anggota.

Sasaran jang pertama dari PVH jalah maklumat pemerintah tentang akan ditjabutnja tambahan upah karena kemahalan, jang telah berdjalan beberapa tahun. Alasan pemerintah jalah untuk menghemat belandja pemerintah. Seluruh kaum buruh bersatu dalam menghadapi tindakan pemerintah ini.

Keadaan upah kaum buruh dalam tahun-krisis 1922 adalah sangat buruk. Ini menjejabkan timbulnja desa-

kan jang sangat keras dari kaum buruh untuk mengadakan pemogokan, dan dalam berbagai kongres soal mogok mendjadi pemitjaraan jang hangat. Dalam menghadapi desakan kaum buruh sematjam ini, pemimpin² reformis menundjukkan tidak setianja kepada kepentingan kaum buruh dan mentjari djalan untuk selamat sendiri. Dengan demikian kaum buruh mengenal siapa pemimpinnja jang sedjati dan siapa jang bukan.

Dalam Kongres PPPB, bulan Agustus 1922 di Ambarawa, soal mogok djuga mendjadi pemitjaraan jang hangat. Dalam kongres ini ditekankan oleh pemimpin² reformis dari SI jang duduk dalam PPPB supaya djangan sampai diadakan pemogokan, karena pemogokan hanja akan membikin lebih tjelaka nasib kaum buruh. "Lihatlah pengalaman pemogokan jang kalah bulan Agustus 1921", demikian kata pemimpin² reformis. Kongres PPPB kali ini sangat tidak memuaskan para pengundjung kongres, karena dalam keadaan dimana nasib kaum buruh berada dalam antjaman, pemimpin² tidak memberikan djalan dan pembelaan. Mereka hanja memberikan djalan sebagai jang diinginkan oleh madjikan, jaitu supaya tidak mogok.

Sebaliknja dalam lingkungan VSTP kaum Komunis mendapat pengaruh jang lebih besar. Tentang maksud pemerintah untuk mentjabut tambahan upah karena kemahalan dan tentang maklumat pemerintah mengenai penghematan mendjadi pemitjaraan jang hangat dalam rapat² kaum buruh kereta-api.

Djuga dalam kongres PVH di Semarang pada achir Desember 1922, dan dalam rapat pimpinan serikatburuh² di Surabaya pada achir tahun itu djuga, soal pemogokan mendjadi pemitjaraan hangat.

Bulan Djanuari 1923 VSTP mengeluarkan surat sebaran jang berisi pernjataan akan mengadakan pemogokan djika peraturan pemerintah tentang penghematan didjalankan. Ini masuk akal, karena djika terdjadi penghematan maka akan terdjadi massa-

ontslag. Surat sebaran ini dibagikan dan di-tempel² kan distasion serta dibatja oleh kaum buruh dengan penuh perhatian. Dalam rapat umum VSTP bulan Februari 1923 soal pemogokan dibitjarakan, dan dalam rapat ini diingatkan kepada direksi² maskapai spoor dan tram supaya "tidak bermain dengan api".

Dalam kongres VSTP tanggal 3-4 Maret 1923 diputuskan bahwa VSTP menggabungkan diri pada **Gabungan Serikatburuh Internasional (Profintern)**. Ini adalah langkah untuk menghubungkan aksi² kaum buruh Indonesia dengan kaum buruh sedunia, untuk menanamkan solidaritet internasional pada kaum buruh Indonesia, bahwa perdjjuangan kaum buruh Indonesia adalah sebagian daripada perdjjuangan kaum buruh sedunia. Dalam kongres VSTP ini Semaun mendapat kekuasaan untuk mengadakan perundingan² dulu dengan pembesar² kereta-api sebelum mengadakan pemogokan. Disini kelihatan tindakan jang hati² dari fihak VSTP, tidak gegabah dalam mengadakan aksi². Tetapi pemimpin VSTP tidak menekan kaum buruh supaya djangan mengadakan pemogokan, seperti jang dilakukan oleh pemimpin² reformis.

Tanggal 12 April 1923 diadakan rapat antara kepala²-dinas kereta-api dengan pengurus besar VSTP, dan dalam pertemuan ini pimpinan VSTP mengadjukan tuntutan pokok sebagai berikut :

1. tetap mempertahankan "duurtebijslag" (tambahan kenaikan upah);
2. didjalankannja 8-djam kerdja sehari;
3. supaya diadakan badan arbitrase djika ada perse-lisihan antara madjikan dan buruh.

Selain dari itu dituntut upah minimum f. 1,— sehari, sedangkan upah jang sudah diakui tahun 1921 tidak boleh dikurangi.

Diantara usul² VSTP tidak ada jang diterima. Mengenai 8-djam kerdja didjandjikan akan diadakan enquette tentang waktu-kerdja dan waktu-istirahat,

dan tentang badan arbitrase kepala inspektur SS tidak mempunyai keberatan prinsipil, tetapi dianggapnya bahwa badan demikian tidak perlu untuk pegawai negeri.

Setelah njata bahwa perundingan tidak membawa hasil. Semaun menerangkan bahwa selanjutnya kaum buruhlah yang akan berbitjara dan dia tidak tanggung akan akibatnya.

Berhubung dengan kegagalan perundingan VSTP-SS, di-mana² diadakan rapat² penerangan oleh VSTP. Kegiatan² dalam mengadakan penerangan², dimana kolonialisme mendapat serangan² yang sengit, menyebabkan pemerintah Hindia Belanda mengadakan peringatan pada Semaun supaya perkataan dan perbuatannya² jangan "terlalu galak". Peringatan pemerintah ini dijawab dengan kontan, bahwa kaum buruh tidak bisa mendjamin keinginan pemerintah.

Tanggal 29-30 April 1923 di Surabaya diadakan rapat vaksentral PVH. Dalam rapat ini diputuskan, bahwa pemogokan umum dari kaum buruh spoor dan tram akan dilangsungkan jika salah seorang pemimpin buruh ditangkap oleh pemerintah. Dalam rapat VSTP di Semarang, tanggal 6 Mei, sekali lagi diterangkan oleh Semaun, bahwa pemogokan harus diadakan jika terdjadi penangkapan atas salah seorang pemimpin buruh.

Pemerintah Hindia Belanda memprovokasi pemogokan dengan menangkap Semaun pada tanggal 8 Mei 1923 dengan alasan persdelik. Segera buruh kereta-api mengadakan rapat, dimana diproklamasikan pemogokan yang dimulai pada hari itu juga, mula² di Semarang, kemudian meluas ke Madiun dan Surabaya. Pemogokan ini kemudian bersifat umum dan diikuti oleh 13.000 dari 20.000 buruh kereta-api. Juga buruh bangsa Eropa ambil bagian dalam pemogokan ini. Pemogokan ini oleh pemerintah dinjatakan diluar hukum. Di-daerah² dimana terdjadi pemogokan hak berapat sangat

dipersempit, sedangkan propaganda pemogokan dian-tjam dengan hukuman (artikel 161 bis Kitab Undang² Hukum Pidana).

Dengan sangat membatasi hak berapat dan dengan larangan berpropaganda, pemerintah berusaha memisahkan pemimpin² buruh dari massa kaum buruh. Dalam bulan Mei itu juga pemogokan dapat ditindas oleh pemerintah. Dengan putusan Pemerintah tanggal 3 Agustus 1923, Semaun diasingkan ke Timor, tetapi atas permintaannya sendiri Semaun diberi kesempatan untuk meninggalkan Indonesia.

Demikianlah pemerintah Hindia Belanda membikin lumpuh serikatburuh² yang terbesar : PFB dalam bulan Agustus 1920, PPPB dalam bulan Djanuari 1922 dan VSTP dalam bulan Mei 1923. Tetapi dengan ini sama-sekali tidak berarti bahwa aktivitas gerakan buruh revolusioner mendjadi berhenti, dan juga tidak berarti bahwa pengaruh kaum Komunis mendjadi berkurang. Malahan apa yang kita lihat ialah, bahwa pemetjatan² terhadap buruh pegadaian dan buruh kereta-api, telah menyebabkan lahirnya pemimpin² baru dari kalangan pemogok yang dipetjat. Ini juga antara lain yang menyebabkan, bahwa sehabis tiap² pemogokan besar timbul beberapa serikatburuh baru yang dipimpin oleh kaum pemogok yang dipetjat. Dan dari mereka tidak sedikit jg. kemudian mendjadi pemimpin SI, Serikat Rak-jat dan PKI. Kaum buruh Indonesia mendapat pengalaman, bahwa dalam keadaan yang paling sulit, dimana krisis menimpa nasib kaum buruh yang memang sudah tjelaka, kaum Komunis Indonesia dengan PKI sebagai Partainya, berdiri didepan memberikan pimpinan dan pembelaannya, walaupun kaum Komunis sendiri berada dalam antjaman pendjara dan buangan. Pengalaman kaum buruh Indonesia sendiri memberi peladjaran, bahwa hanya kaum revolusioner yang setia pada per-djuangan kaum buruh, sebagai kebalikan daripada kaum reformis, yang meninggalkan barisan kaum buruh

dikala taufan reaksi sedang mengamuk. Kaum buruh Indonesia mendapat pelajaran, bahwa omongan "keras" dan "radikal" dari pemimpin reformis dalam keadaan dimana tidak ada perjuang hidup-mati antara buruh dengan majikan, belum bisa dijadikan ukuran bahwa dalam keadaan pertarungan melawan majikan mereka akan memihak kaum buruh.

Atas inisiatif Gabungan Serikatburuh Internasional Merah (Profintern) dalam bulan Djuni 1924 diadakan konferensi buruh transport Pasifik di Kanton. Dalam konferensi ini hadir wakil² buruh pelajaran dan pelabuhan dari pelabuhan² yang penting didaerah Pasifik. Dari Indonesia hadir Alimin dan Budisutjitro, dan mereka ketjuali menghadiri konferensi juga bertemu dengan Dr. Sun Yat Sen, yang ketika itu memimpin revolusi Tiongkok. Dalam konferensi ini antara lain diputuskan, untuk mengeratkan hubungan buruh transport didaerah Pasifik, membentuk kantor yang berkedudukan di Kanton dengan bagian²-nja untuk Tiongkok, Filipina, Djepang, India dan Indonesia.

Dalam keadaan dimana gerakan Buruh baru mendapat pukulan dari reaksi, dimana hak² demokrasi yang sudah sempit makin hari makin dibatasi, dan pemimpin² buruh banjak yang dibuang atau diasingkan keluar negeri, maka sangatlah besar artinja Kongres PKI dalam bulan Desember 1924 di Kota Gede, Djakarta. Ketika itu PKI mempunyai 38 Seksi yang meliputi 1.140 anggota, sedangkan Serikat Rakjat, "Onderbouw" PKI, ketika itu mempunyai 46 Seksi dan meliputi 31.000 anggota. Kongres ini diketuai oleh Alimin, dan hadir pula dalam Kongres ini Budisoetjitro, Darsono, Musso, Aliarcham dll. Alimin menjampaikan hasil perkundjungannya ke Konferensi transport daerah Pasifik. Atjara yang terpenting dalam Kongres ini ialah membi-tjarakan usul Aliarcham yang menghendaki pembubaran Serikat Rakjat dan pekerjaan Partai supaya dipusatkan pada Serikatburuh. Alasan Aliarcham ialah,

karena dalam S.R. tergabung massa burdjuis ketjil, dan massa burdjuis ketjil adalah tidak bisa dipertjaja dalam semua aksi. Usul Aliarcham mendapat tentangan yang sengit, karena Kongres yang sebelumnya telah mengakui S.R. sebagai "Onderbouw" PKI. Achirnja diambil putusan yang tidak djelas, jaitu bahwa tidak lagi akan didirikan Tjabang² S.R. yang baru, dan anggota S.R. yang telah ada sedapatnja dijadikan anggota PKI.

Walaupun memang tidak tepat S.R. disusun sebagai "Onderbouw" PKI, tetapi dari putusan mengenai pembekuan S.R. dengan alasan bahwa dalam S.R. banjak elemen burdjuis ketjil djelaslah bahwa PKI ketika itu belum mengerti pentingnja persatuan kaum Buruh dengan klas burdjuis ketjil, terutama kaum tani, sebagai basis daripada front persatuan nasional untuk menudju Indonesia Merdeka. Kesalahan ini sama dengan kesalahan yang ada pada aliran Marxis "Kiri" di Eropa Barat, jaitu pemandangan yang salah mengenai kaum tani dan mengenai gerakan nasional. Oleh karena itu laporan Semaun dalam pleno ke 6 dari Komintern (tg. 21 Maret dan 6 April 1925), yang menyatakan bahwa Gerakan Nasional merugikan PKI dikritik oleh konferensi Komintern. Tentang Serikat Rakjat yang ketika itu sudah berakar di masjarakat tidak dinjatakan mesti dibubarkan, tetapi "Adalah perlu, bahwa S.R. memisahkan diri sebagai organisasi yang berdiri sendiri. S.R. harus tumbuh menjadi partai nasional demokratis yang bersifat massa dengan programnja sendiri, dimana yang harus diperhatikan ialah soal agraria dan organisasi tani yang bersifat kope-ratif".

Putusan bahwa anggota S.R. se-banyak²nja akan dijadikan anggota PKI, agar pelahan² dapat melikwidasi S.R., adalah menimbulkan bahaya, bahwa djustru karena putusan ini, terbuka pintu PKI bagi elemen² burdjuis ketjil yang dianggap sebagai elemen yang "tidak bisa dipertjaja" itu. Kemudian ternyata, bahwa

membubarkan S.R. memang tidak mudah, demikian juga mendjadikan S.R. suatu organisasi yang berdiri sendiri lepas dari PKI. Pengalaman revolusi Rakjat (tahun 1945 - 1948) menundukkan, bahwa kaum tani ada lebih baik diorganisasi oleh organisasi massa tani yang biasa, daripada oleh S.R. yang sulit sekali dan banjak makan waktu djika hendak dipisahkan dari PKI. Oleh karena itu pimpinan PKI memutuskan untuk meniadakan S.R. dan memperkuat organisasi² massa kaum tani yang djuga sudah mempunyai program yang baik dan nama yang baik dikalangan kaum tani Indonesia.

Akibat dari putusan Kongres PKI di Djokja itu, yang menitik beratkan pekerdjaannja dikalangan kaum buruh, memang menimbulkan kegiatan yang sangat besar dalam gerakan buruh. Di-mana² kaum Komunis berusaha membangunkan dan memimpin serikatburuh. Dikalangan pegawai negeri dan buruh perusahaan pemerintah, perusahaan pengangkutan, industri dan tambang terutama di Surabaya, kota pusat perdagangan dan industri, transport darat dan laut, pengaruh kaum Komunis sangat besar.

Pada achir bulan Desember 1924 di Surabaya diadakan konferensi buruh pelabuhan dan pelajaran. Dalam konferensi ini nampak sekali betapa besarnya pengaruh konferensi buruh transport daerah Pasifik di Kanton, dan ini telah mendorong buruh pelabuhan dan pelajaran Indonesia untuk lebih mempersatukan diri. Demikianlah terdjadi penggabungan antara **Serikat Laut dan Gudang** di Semarang dengan **Serikat Kaum Buruh Pelabuhan** di Djakarta dan Surabaya mendjadi SPPL (**Serikat Pegawai Pelabuhan dan Lautan**), dan SPPL dirantjangkan digabungkan dengan SPLI (**Serikat Pegawai Laut Indonesia**), jaitu organisasi anak kapal Indonesia yang didirikan oleh Semaun di Amsterdam pada kira² petengahan tahun 1924. Selain daripada itu, djuga di Surabaya, dalam rapat yang dihadiri serikat-

buruh² kereta-api, pegadaian, douane, gula, minjak, dll. diputuskan mengadakan **Sekretariat Serikatburuh Indonesia Merah**, yang akan masuk mendjadi anggota Gabungan Serikatburuh Internasional Merah (Profintern) di Moskow dan djuga mendjadi anggota **Pan Pacific Labour Union** di Kanton.

Tanggal 21 Djuli 1925 petjah pemogokan buruh pertjetakan dibawah pimpinan **Serikatburuh Tjetak** di Semarang, mula² hanja disatu perusahaan, tetapi kemudian mendjalar ke-pertjetakan² lain. Tanggal 1 Agustus 1925 petjah pemogokan di Rumah Sakit Umum Negeri (CBZ) Semarang, sebagai protes terhadap perbuatan angkuh dan keras dari dokter bangsa Belanda. Serikatburuh pegawai Rumah Sakit Umum adalah anggota dari vaksentral PVH, yang pada waktu itu mengikat 20 serikatburuh yang meliputi 30.000 anggota. Bersamaan waktunja, terdjadi djuga pemogokan buruh transport pada **Semarangse Stoomboot- dan Prauwenveer** dibawah pimpinan SPPL, dimana ikutserta 1.000 kapten dan matros² kapal bangsa Indonesia.

Takut kalau² pemogokan mendjalar lebih djauh, dan untuk mendjaga apa yang dinamakan "ketertiban umum", pemerintah Hindia Belanda berusaha memisahkan pemimpin buruh yang masih ada (sebagian sudah dibuang) dari massa kaum buruh. Dengan putusan Pemerintah tanggal 17 Desember 1925, tiga orang yang tersangkut sebagai pemimpin pemogokan, jaitu **Aliarcham, Mardjohan, dan Darsono** diinternir, sedang Alimin dan Musso masih sempat meloloskan diri dari Indonesia. Dalam bulan Djanuari 1926 Darsono diizinkan meninggalkan Indonesia dan dia pergi keluar-negeri.

Keadaan dimana gerakan buruh kehilangan banjak pemimpin²nja, dimana PKI kehilangan kader²nja yang penting dan dimana PKI belum mendapatkan teori yang tepat dalam menjusun dan memobilisasi kekuatan Rakjat melawan imperialisme dan feodalisme, menempatkan

kedudukan PKI dan klas buruh Indonesia dalam keadaan yang sangat sulit ketika terdjadi pemberontakan kaum tani, yang dimulai pada malam tanggal 12/13 November 1926 di Menes (Banten) dan kemudian mendjalar keberbagai tempat di Djawa; sedangkan di Sumatera pemberontakan dimulai pada awal 1927. Dan adanya pemberontakan kaum tani yang tidak terpimpin dengan baik ini, sudah tentu digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kesempatan untuk lebih menghantjurkan gerakan buruh dan PKI, dan tentu dengan fitnahan bahwa pemberontakan "diredentjanakan oleh PKI". Padahal tindakan pemerintah Belanda sendiri yang provokatif, yang menimbulkan kemarahan Rakjat, dengan djalan mengadakan pembatasan hak bersidang dan hak berbitjara, dengan mengadakan larangan terhadap sekolah Serikat Rakjat tahun 1924 yang menjebakkan kaum tani mengadakan perlawanan memper-tahankan sekolahnja, dengan membuang pemimpin Rakjat, dengan mengadakan kekangan pers dan pemberangusan puluhan madjalah kaum buruh dan Komunis, dengan menangkapi redaktur kaum buruh dan Komunis, dengan mengadakan penjerbuan terhadap kantor serikatburuh dan menangkapi aktivis serikatburuh, dengan mengadakan barisan teror yang terkenal dengan nama "Sarekat Hédjo", dan banjak lagi tindakan pemerintah Belanda yang menimbulkan kemarahan Rakjat. Selain daripada itu politik kolonial telah membikin nasib kaum buruh dan kaum tani makin hari makin lebih merosot dan achirnja tak tertahankan lagi.

Walaupun PKI, sesudah pemberontakan terdjadi, berusaha untuk memberikan pimpinan se-dapatnja dan Rakjat mengadakan perlawanan yang perwira, tetapi achirnja pemberontakan kaum tani itu bisa ditindas satu persatu. Dengan kekedjaman yang luar biasa pemerintah menggunakan tangan besinja. Dalam keadaan demikian, watak kaum reformis seperti Hadji Agus Salim cs. sudah samasekali tidak bisa disembunji-

kan lagi. Mereka terang an memihak pemerintah kolonial dan pada hakekatnja mereka bergembira karena kekuatan Rakjat dirusak-binasakan oleh reaksi. Dalam menghadapi hukuman mati yang didjatuhkan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap pemberontak yang perwira, kaum sosial demokrat dan kaum reformis lainnja pada prinsipnja menjetudjui tindakan pemerintah, dan mereka hanja memohon pada pemerintah djadjaan supaya yang dihukum jalah orang yang disebutnja "bersalah".

Pemberontakan tahun 1926-1927 dapat ditindas oleh pemerintah kolonial. Kekalahan Rakjat dalam pemberontakan ini membawa kerusakan pada gerakan kemerdekaan, dan inilah yang ditudju oleh imperialis Belanda. Tetapi sebaliknya, kekalahan pemberontakan tahun 1926-1927 telah memberi peladjaran pada PKI dan Rakjat Indonesia. Pemberontakan tahun 1926-1927 telah mengalami kekalahan karena tidak diredentjanakan, dan dengan sendirinja tidak ada pimpinan terpusat yang kuat sehingga tidak mungkin ada kordinasi antara aksi diberbagai daerah. PKI pada waktu itu tidak mempunyai program agraria yang sudah difikirkan matang, yang djelas dan revolusioner, yang bisa dipakai sebagai dasar dari aksi kaum tani. Dengan tidak adanya program agraria dari PKI, tidak mungkin ada hubungan antara tuntutan kaum buruh dikota dengan tuntutan kaum tani didesa yang berada dalam keadaan lebih tertindas. Demikianlah kita lihat, pemogokan kaum buruh sebelum tahun 1926 tidak mendapat sambutan kaum tani didesa dan perlawanan kaum tani di-desa tidak mendapat pimpinan setjara teratur dari klas buruh dan dari Partainja, jaitu PKI. Selain daripada itu pekerdjaan menarik kaum terpeladjar dan kaum pengusaha nasional, yang pada waktu itu djuga tidak puas terhadap kolonialisme, sangat diabaikan, malahan slogan yang menuntut "sosialisme", "soviet" dan "diktatur proletariat", seperti yang diputuskan oleh konferensi PKI

tanggal 7-10 Djuni 1924 di Djakarta, telah membikin kaget klas² ini dan mendjauhkan mereka dari perdjuangan revolusioner melawan imperialisme dan feodalisme.

Gerakan kaum buruh dan gerakan revolusioner Indonesia mendapat pukulan yang lebih besar lagi dengan perbuatan Tan Malaka yang bersifat melikwidasi PKI dan mendirikan PARI (Partai Republik Indonesia) pada pertengahan tahun 1927 diluar negeri (Tan Malaka tahun 1922 dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda dari Indonesia berhubung dengan pemogokan buruh pegadaian). Likwidasiisme Tan Malaka telah memperbesar kekalahan pemberontakan, dan telah memberikan didikan yang djelek pada gerakan revolusioner Indonesia, karena akibatnja telah menimbulkan perpetjahan yang besar dalam barisan revolusioner serta memberi kemungkinan² istimewa pada aparat Belanda (kemudian Djepang) untuk memetjahbelah dan merusak PKI serta gerakan revolusioner umumnja yang pada waktu itu terpaksa bekerdja dibawah tanah.

Sematjam kapitulasi sudah dilakukan oleh Semaun dalam bulan Desember 1926, djadi ketika pemberontakan sedang hangat²nja di Indonesia. Pada malam tanggal 5 Desember 1926 terdjadilah suatu peristiwa yang sangat menjedihkan bagi proletariat dan Rakjat Indonesia, karena pada malam itu **Semaun**, sebagai wakil PKI mengadakan kontrak dengan **Mohammad Hatta**, sebagai wakil PI (Perhimpunan Indonesia). Kontrak ini dibikin di Leiden dan isinja adalah menghina proletariat dan Rakjat Indonesia, apalagi dimana Rakjat sedang mengadakan pemberontakan yang perwira melawan pendjadjahan Belanda. Didalam kontrak itu djelas dikatakan bahwa PKI harus menjerahkan pimpinan gerakan Rakjat pada PI. Tidak hanja itu, PKI djuga diwadjibkan mengakui pimpinan PI, harus mempertjajai PI dengan sepenuh hati dan menjerahkan semua kekajaannja yang ada pada PI. Dengan sendiri-

nja, kapitulasi Semaun sebagai wakil proletariat Indonesia kepada Mohammad Hatta, disambut oleh kaum burdjuis sebagai suatu kemenangan yang besar, dan Hatta sebagai triomfatornja. Dengarkan isi kalbu kaum burdjuis dalam menjambut kemenangan mereka ini: "Semaun, yang di Djawa terlihat sebagai sebuah gunung diatas sebuah dataran, adalah seorang yang biasa sadja ditengah peladjar² yang bersendjatakan pengetahuan ekonomi dan politik yang luas" (A.K. Pringgodigdo dalam buku **Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia** halaman 63). Sombong sekali utjapan ini, tetapi demikianlah kemenangan sementara ini disambut oleh golongan burdjuis Indonesia. Tetapi achirnja mereka ketjewa dan gigit djari, karena dengan menundukkan Semaun tidak berarti mereka bisa menundukkan proletariat, karena segera sesudah itu **Komintern** menjalahkan tindakan Semaun, sehingga Semaun terpaksa mentjabut kontraknja dengan lekas dan dengan terang²an.

Dengan dibuangnja pemimpin² buruh seperti diterangkan diatas dan dengan adanya larangan bersidang, berarti pukulan yang keras bagi vaksentral PVH. Apalagi sesudah pemberontakan tahun 1926, yang mengakibatkan kaum Komunis dibunuh, dipendjarakan dan dibuang, pada waktu itu boleh dikata PVH tidak berdaja lagi, sekalipun sebagian serikatburuh² anggota PVH masih terus berdiri.

SI yang selama ada pemogokan² berdiri diluar pemogokan, berusaha untuk mengambil pimpinan serikatburuh yang terpaksa ditinggalkan oleh kaum Komunis karena dimasukkan pendjara atau dibuang. Walaupun tidak ada saingan dari kaum Komunis, keadaan sudah tidak mungkin bagi SI untuk mengambil pimpinan serikatburuh². Tentang ini diterangkan oleh A.K. Pringgodigdo dalam bukunya **Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia** dihalaman 99 sebagai berikut:

"Akan tetapi SI tidak berdaja lagi untuk memper-

64